

PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* TERHADAP *TAX AVOIDANCE*

(STUDI PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2014-2016)

SKRIPSI

**Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana
pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**

**NORMA WAHYUNINGRUM
NIM 145030400111036**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN
MALANG**

2018

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada :

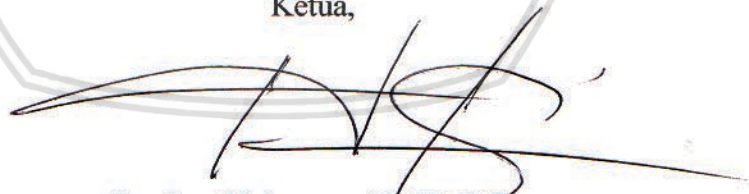
Hari : Rabu
 Tanggal : 9 Mei 2018
 Jam : 10.00 WIB
 Skripsi atas nama : Norma Wahyuningrum
 Judul : Pengaruh *Good Corporate Governance* dan *Corporate Social Responsibility* terhadap *Tax Avoidance* (Studi pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2016)

dan dinyatakan,

LULUS

MAJELIS PENGUJI

Ketua,



Dr. Drs. Muhammad Saifi, M.Si
 NIP. 19570712 198503 1 001

Anggota,



Dr. Kadarisman Hidayat, M.Si
 NIP. 19600515 198601 1 002



Astri Warik Anjarwi, SE., MSA, Ak
 NIP. 2013048703162001

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRPSI

Saya Norma Wahyuningrum menyatakan dengan sebesar-besarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, didalam skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan suatu gelar atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Malang, 16 April 2018



Norma Wahyuningrum

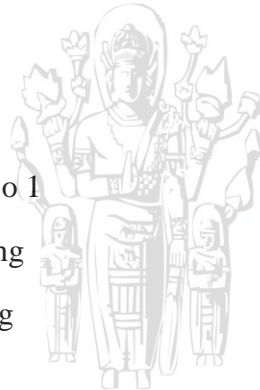
CURRICULUM VITAE**BIODATA**

Nama : Norma Wahyuningrum
Nomor Induk Mahasiswa : 145030400111036
Tempat dan Tanggal Lahir : Malang, 06 Desember 1994
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Email : normawahyuningrum@gmail.com
Alamat Asal : Jl. Kebonagung No. 139 Singosari, Malang

**RIWAYAT PENDIDIKAN**

Pendidikan Formal

1. SD Negeri Tamanharjo 1 Tahun 2001-2007
2. SMP Negeri 11 Malang Tahun 2007-2010
3. SMA Negeri 8 Malang Tahun 2010-2013



UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

Bapak Dr. Drs. Muhammad Saifi, M.Si selaku Dosen Pembimbing. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, Bapak Dr. Mochammad Al Musadieg, MBA selaku Ketua Jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, Rekan-rekan Perpajakan angkatan 2014 yang telah banyak memberikan bantuan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini. Terima kasih penulis persembahkan kepada ibunda dan ayahanda tercinta atas dorongan dan doa yang tulus ikhlas mengiringi penulis selama menuntu ilmu.

Malang, 9 Mei 2018

Penulis

RINGKASAN

Norma Wahyuningrum, 2018, **Pengaruh *Good Corporate Governance* dan *Corporate Social Responsibility* terhadap *Tax Avoidance* (Studi pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2016)**. Dr. Drs. Muhammad Saifi, M.Si, 99 Hal + xiv

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG dan *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap *Tax Avoidance*. *Good Corporate Governance* (GCG) diproksi oleh Komisaris Independen serta Komite Audit, sedangkan *Corporate Social Responsibility* (CSR) diproksi oleh *Corporate Social Responsibility Disclosure Index* (CSRDI) dan *Tax Avoidance* diproksi oleh *Current ETR*. *Corporate Social Responsibility Disclosure Index* serta diukur berdasarkan *Global Reporting Initiative 4.0*. Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan eksplanatif.

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2014 sampai dengan 2016 yaitu sebanyak 41 perusahaan. Sampel penelitian berjumlah 11 perusahaan atau 33 data observasi yang dipilih dengan metode *purposive sampling*. Data yang dipergunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari *website* Bursa Efek Indonesia (BEI) dan analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda.

Hasil penelitian membuktikan bahwa Komisaris Independen dan Komite Audit dan juga *Corporate Social Responsibility* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*. Secara parsial Komisaris Independen dan Komite Audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*, sedangkan *Corporate Social Responsibility* secara parsial berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*.

Kata kunci : *Good Corporate Governance*, Komisaris Independen, Komite Audit, *Corporate Social Responsibility*, *Tax Avoidance*.

SUMMARY

Norma Wahyuningrum, 2018, *The Influence of Good Corporate Governance and Corporate Social Responsibility against Tax Avoidance (Study on Mining Companies that Listed on Indonesia Stock Exchange in 2014-2016)*. Dr. Drs. Muhammad Saifi, M.Si, 99 pages + xiv

This study aims to find out the influence of Good Corporate Governance (GCG) and Corporate Social Responsibility (CSR) towards Tax Avoidance, Good Corporate Governance (GCG) is proxy by Independent Commissioner and Audit Committee, while Corporate Social Responsibility (CSR) is proxy by Corporate Social Responsibility Disclosure Index (CSRDI) and Tax Avoidance is proxied by Current ETR. Corporate Social Responsibility Disclosure Index measured by Global Reporting Initiative 4.0. This research uses quantitative research with explanative approach.

The population in this study is mining companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) in 2014 until 2016 that is as many as 41 companies. The sample of research are 11 companies or 33 observation data selected by purposive sampling method. The data are secondary data that obtained from the Indonesia Stock Exchange (IDX) website and the data analysis by multiple linear regression analysis.

The results show that Independent Commissioner and Audit Committee as a proxy of Good Corporate Governance and also Corporate Social Responsibility simultaneously have a significant effect on Tax Avoidance. Partially, the Independent Commissioner and Audit Committee have no significant effect on Tax Avoidance, while Corporate Social Responsibility partially has significant effect on Tax Avoidance.

Key Words : Good Corporate Governance, Independent Commissioners, Audit Committee, Corporate Social Responsibility, Tax Avoidance.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengaruh *Good Corporate Governance* dan *Corporate Social Responsibility* terhadap *Tax Avoidance* (Studi pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2016)”**.

Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana Perpajakan pada Jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Mohammad Bisri, MS, selaku Rektor Universitas Brawijaya
2. Bapak Prof. Dr. Dra. Bambang Supriyono, MS, selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
3. Bapak Dr. Drs. Mochammad Al Musadieg MBA selaku Ketua Jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
4. Bapak Dr. Kadarisman Hidayat, M.Si selaku Ketua Program Studi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
5. Bapak Dr., Drs. Muhammad Saifi selaku Dosen Pembimbing Penyusunan skripsi yang telah memberikan bimbingan serta arahan dalam penulisan skripsi ini.

6. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Program Studi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang yang telah memberikan ilmunya.
7. Orangtua serta keluarga yang memberikan dukungan serta do'a dalam penulisan skripsi ini.
8. Sahabat serta teman saya yaitu Erlista Wahyu Nur Andini, Kautsarin Natalia K., Rakles Candra Nurjanah, Rani Dika, Mega Popi serta Novitasari yang telah memberikan dukungan serta bantuan dalam penulisan skripsi ini.
9. Teman-teman seperjuangan Program Studi Perpajakan Angkatan 2014 terimakasih untuk kebersamaan dan kerukunan selama empat tahun ini.
10. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih belum sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, 16 April 2018

Peneliti

DAFTAR ISI

	Halaman
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	i
TANDA PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
RINGKASAN	vi
SUMMARY	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kontribusi Penelitian	11
1. Kontribusi Akademis	11
2. Kontribusi Praktis	11
E. Sistematika Pembahasan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Tinjauan Empiris	14
B. Tinjauan Teoritis	19
1. Teori Stakeholder	19
2. Teori Legitimasi	20
3. Teori Agensi	20
4. <i>Good Corporate Governance</i>	21
5. <i>Corporate Social Responsibility</i>	26
6. <i>Tax Avoidance</i>	29
C. Pengaruh Antar Variabel	31
1. Pengaruh Komisaris Independen terhadap <i>Tax Avoidance</i>	31
2. Pengaruh Komite Audit terhadap <i>Tax Avoidance</i>	32
3. Pengaruh <i>Corporate Social Responsibility</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i>	32
D. Model Konsep	33
E. Model Hipotesis	34
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Jenis Penelitian	36



B. Identifikasi Variabel dan Definisi Operasional Variabel	36
1. Identifikasi Variabel.....	36
2. Definisi Operasional Variabel.....	41
C. Populasi dan Sampel	41
D. Jenis dan Sumber Data	44
E. Teknik Pengumpulan Data	44
F. Teknik Analisis Data	45
1. Uji Statistik Deskriptif.....	45
2. Uji Asumsi Klasik	45
3. Analisis Regresi Linier Berganda.....	48
4. Uji Hipotesis.....	49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	52
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	52
B. Profil Singkat Perusahaan Sampel Penelitian	53
C. Analisis Data	58
1. Analisis Statistik Deskriptif.....	58
2. Uji Asumsi Klasik	64
3. Analisis Regresi Linier Berganda.....	69
4. Uji Hipotesis.....	70
D. Pembahasan	74
1. Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit dan <i>Corporate Social Responsibility</i> secara simultan terhadap <i>Tax Avoidance</i>	74
2. Pengaruh Parsial serta Variabel Dominan	75
BAB V PENUTUP	80
A. Kesimpulan.....	80
B. Keterbatasan Masalah	81
C. Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA	83

DAFTAR TABEL

No	Judul	Halaman
1	Penelitian terdahulu.....	17
2	Keterangan perhitungan variabel	36
3	Definisi operasional variabel.....	41
4	Kriteria pemilihan sampel	43
5	Pengambilan keputusan autokorelasi	48
6	Daftar nama perusahaan yang memenuhi kriteria sampel	52
7	Proporsi komisaris independen	59
8	Komite audit.....	60
9	<i>Corporate Social Responsibility Disclosure Index</i>	62
10	<i>Current ETR</i>	63
11	Hasil uji normalitas	65
12	Hasil uji multikolinearitas	66
13	Hasil uji glejser	68
14	Hasil uji autokorelasi.....	69
15	Hasil regresi linier berganda	69
16	Hasil koefisien determinasi	71
17	Hasil uji F	72
18	Hasil uji t.....	73
19	Peringkat koefisien beta	78

DAFTAR GAMBAR

No	Judul	Halaman
1	Model konsep.....	33
2	Model hipotesis.....	34
3	Uji normalitas.....	64
4	Uji heteroskedastisitas.....	67



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam. Sumber daya alam tersebut berupa kekayaan alam yang terdiri dari emas, batubara, gas alam, timah, minyak bumi dan lain sebagainya. Kekayaan alam yang berlimpah tersebut dapat dimanfaatkan oleh beberapa pihak yang berusaha untuk mengolahnya. Salah satunya pihak yang berusaha untuk mengelola kekayaan alam tersebut yaitu perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan. Perusahaan merupakan unit bisnis yang didalamnya adalah kelompok orang yang memiliki tujuan sama dan berusaha mencapai tujuan tersebut secara bersama (Hadi, 2014:25). Orientasi perusahaan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan bagi para pemilik (*shareholder*) dan kreditur (Hadi, 2014:25). Batasan tersebut sesungguhnya adalah cara pandang lama (tradisional), yang karena perjalanan waktu dan pengalaman sejarah sudah tidak relevan lagi (Hadi, 2014:25).

Semakin berkembangnya bisnis dapat mendorong meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia. Namun, dengan adanya perkembangan bisnis tidak selalu memberikan dampak yang positif. Terdapat beberapa dampak negatif yang ditimbulkan dari adanya perusahaan tersebut, salah satunya yaitu dampak yang ada di lingkungan seperti polusi yang ditimbulkan dari aktivitas perusahaan tersebut yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan serta mengganggu masyarakat yang ada disekitar lingkungan bisnis tersebut. Oleh

karena itu perusahaan perlu menerapkan etika bisnis dalam menjalankan usahanya.

Etika bisnis merupakan penerapan etika secara umum terhadap perusahaan (Hamali, 2016:272). Perusahaan dituntut untuk lebih banyak memperhatikan aspek-aspek sosial dan etika bisnis secara jujur (Gitosudarmo, 2012:166). Penerapan etika bisnis dapat meminimalisir terjadinya bentrokan antara perusahaan dengan *stakeholdernya*. Salah satu bentuk penerapan etika bisnis adalah dengan menerapkan *Good Corporate Governance*.

Good Corporate Governance merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan perusahaan agar usahanya dapat berkembang secara berkelanjutan. Hal ini dikarenakan dengan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik, perusahaan menjalankan usahanya dengan memperhatikan etika bisnis yang ada. *Good Corporate Governance* itu sendiri, lahir dan berkembang akibat semakin jelas dan kuatnya pemisahan fungsi dari dua komponen utama dari perusahaan, yaitu antara komponen pemilik perusahaan (*owner*) dan komponen pengelolaan perusahaan (Pandiangan, 2014:241).

Pengertian dari *Good Corporate Governance* adalah kumpulan hukum, peraturan, dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi yang dapat mendorong sumber daya perusahaan bekerja secara efisien, selain menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkelanjutan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan (*World Bank* dalam Pandiangan, 2014:241). Beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam menjalankan tata kelola perusahaan yang baik yaitu prinsip keterbukaan informasi, akuntabilitas, pertanggungjawaban,

kemandirian, serta kewajaran. Selain itu, terdapat beberapa unsur yang perlu diperhatikan dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik yaitu unsur komisaris independen dan komite audit.

Komisaris independen merupakan salah satu unsur penting dalam *Good Corporate Governance*. Komposisi komisaris independen diatur dalam Peraturan Bursa Efek yaitu sekurang-kurangnya sebesar 30% dari seluruh jumlah anggota dewan komisaris. Salah satu tugas komisaris independen yaitu untuk memastikan prinsip-prinsip dan praktik *Good Corporate Governance* dipatuhi dan dijalankan dengan baik (Effendi, 2016:36). Diharapkan dalam menjalankan tugas tersebut, perusahaan dapat berkembang secara berkelanjutan.

Unsur yang tidak kalah penting dari komisaris independen yaitu komite audit. Komite audit dipimpin oleh ketua yang merupakan anggota komisaris independen (Effendi, 2016:51). Sebagai ketua dari komite audit, komisaris independen hendaknya dapat berperan untuk melakukan deteksi dini adanya potensi penyimpangan maupun kecurangan yang ada di perusahaan publik (Effendi, 2016:38). Adanya komisaris independen dan komite audit diharapkan perusahaan dapat menjalankan *Good Corporate Governance* dengan baik.

Konsep *Good Corporate Governance* itu sendiri, dapat diimplementasikan dalam bentuk *Corporate Social Responsibility* (Wibisono, 2007:12). Keterkaitan antara *Good Corporate Governance* dan *Corporate Social Responsibility* ini dinyatakan dengan ibarat dua mata sisi oleh para ahli, keduanya sama penting dan tidak terpisahkan karena salah satu prinsip *Good Corporate Governance* adalah prinsip pertanggungjawaban Supomo (dalam Wahyudi dan Azheri, 2011:171).

Prinsip pertanggungjawaban (*responsibility*) merupakan prinsip yang memiliki kekerabatan paling dekat dengan *Corporate Social Responsibility*. Dalam prinsip ini, penekanan yang signifikan diberikan kepada *stakeholder* perusahaan. Melalui penerapan prinsip pertanggungjawaban diharapkan perusahaan dapat menyadari bahwa dalam kegiatan operasionalnya perusahaan seringkali menghasilkan dampak eksternal yang harus ditanggung *stakeholders*. Karena itu, wajar bila perusahaan juga memperhatikan kepentingan dan nilai tambah bagi *stakeholder*-nya (Wibisono, 2007:12).

Akhir-akhir ini semakin santer terdengar ungkapan yang mengatakan bahwa umat manusia yang hidup sekarang bukan mewarisi planet bumi dengan segala isinya dari nenek moyang, melainkan dipinjam dari generasi yang masih akan lahir kelak (Siagian, 2012:15). Makna dari ungkapan tersebut ialah bahwa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan umat manusia, Sumber Daya Alam harus diupayakan untuk dilestarikan. Karena itulah banyak pihak yang menyuarakan pandangan mutlak perlunya pembangunan ekonomi yang berwawasan lingkungan dilaksanakan dan dipertahankan (Siagian, 2012:15).

Upaya pelestarian lingkungan bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau tanggung jawab sebagian masyarakat, melainkan tanggung jawab bersama. Dunia bisnis, baik sebagai keseluruhan maupun secara mikro harus berperan secara aktif demi kepentingan dunia usaha tersebut untuk menunjukkan kepedulian terhadap pelestarian lingkungan (Siagian, 2012:17). Operasional perusahaan harus dipertanggungjawabkan baik menurut norma etika, legal, *economic*, maupun bertindak untuk kepentingan masyarakat (Hadi, 2014:33).

Beberapa tahun belakangan konsep tentang *Corporate Social Responsibility* mulai berkembang di Indonesia. Adanya konsep mengenai *Corporate Social Responsibility* menjadikan suatu perusahaan tidak lagi hanya *profit oriented* namun perusahaan tersebut juga harus memperhatikan aspek sosial serta lingkungan atau yang biasa disebut dengan *triple bottom line*. Adanya konsep mengenai *Corporate Social Responsibility* tersebut, diharapkan perusahaan dapat mendorong perkembangan bisnis yang etis dengan mempertimbangkan aspek sosial serta lingkungan sehingga perusahaan tersebut dapat bertahan secara berkelanjutan.

Corporate Social Responsibility merupakan sebuah konsep pembangunan berkelanjutan, sehingga mensyaratkan orientasi perusahaan bergeser dari *shareholder orientation* ke arah *stakeholder orientation* (Hadi, 2014:40). Bergesernya orientasi tersebut menyebabkan tanggung jawab perusahaan tidak hanya berkaitan dengan perolehan laba semata namun juga berkaitan erat dengan *stakeholder* secara keseluruhan yang dapat menentukan keberlangsungan suatu perusahaan. Diharapkan penerapan *Corporate Social Responsibility* mampu menjaga hubungan yang baik antara perusahaan dengan para *stakeholder*, sehingga perusahaan dapat menjaga keberlangsungan usahanya.

Corporate Social Responsibility dalam Bahasa Indonesia biasa disebut dengan tanggung jawab sosial perusahaan. *Corporate Social Responsibility* yaitu tanggung jawab perusahaan kepada para pemangku kepentingan untuk berlaku etis, meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif yang mencakup aspek ekonomi, sosial dan lingkungan (*triple bottom line*) dalam

repository.ub.ac.id

rangka mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (Wibisono, 2007:8). *Corporate Social Responsibility* merupakan faktor kunci kesuksesan dan kelangsungan hidup (*going concern*) perusahaan (Lanis dan Richardson, 2012). Sementara itu, pajak merupakan salah satu bentuk tanggung jawab sosial perusahaan kepada negara. Maka dari itu, tindakan penghindaran pajak merupakan tindakan yang tidak bertanggung jawab sosial.

Perusahaan sebagai wajib pajak badan memiliki beberapa kewajiban. Kewajiban yang utama dibandingkan dengan menjalankan *Corporate Social Responsibility* yaitu memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Pengertian pajak itu sendiri menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Kebijakan Umum dan Tata Cara Perpajakan yaitu:

“pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Pajak itu sendiri merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang penting. Melalui penerimaan dari pajak inilah, pemerintah membiayai pengeluaran rutinnya. Mengingat pentingnya penerimaan pajak bagi negara, maka pemerintah selalu berupaya untuk meningkatkan penerimaan dalam sektor pajak. Bagi perusahaan pajak merupakan beban yang dapat mengurangi penghasilan yang diperoleh dari suatu perusahaan. Oleh karena itu perusahaan berusaha untuk meminimalkan besarnya pajak melalui *tax avoidance*. *Tax avoidance* itu sendiri merupakan upaya yang dilakukan untuk meminimalkan jumlah pajak melalui cara yang legal.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Tax avoidance dapat dilakukan melalui *Corporate Social Responsibility*, karena terdapat beberapa biaya tanggung jawab sosial perusahaan yang dapat dijadikan pengurang penghasilan bruto perusahaan. Kebijakan mengenai pemberian insentif perpajakan atas biaya *Corporate Social Responsibility* diatur dalam UU No. 36 Tahun 2008 pada pasal 6 ayat (1). Pasal tersebut menjelaskan mengenai biaya terkait aktivitas *Corporate Social Responsibility* yang diperkenankan sebagai pengurang penghasilan bruto (*deductible expense*) dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak. Beberapa biaya yang diatur dalam pasal tersebut diantaranya yaitu biaya pengolahan limbah, biaya beasiswa, magang dan pelatihan, sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang diatur dalam Peraturan Pemerintah, sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang diatur dalam Peraturan Pemerintah; biaya pembangunan infrastruktur sosial yang diatur dalam Peraturan Pemerintah, sumbangan fasilitas pendidikan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah, serta sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang diatur dalam Peraturan Pemerintah. Oleh karena itu, apabila perusahaan menjalankan *Good Corporate Governance* dengan baik maka diharapkan dapat meminimalisir tindakan *tax avoidance* sehingga pemerintah dapat memperoleh pajak secara maksimal.

Beberapa penelitian tentang pengaruh *Corporate Social Responsibility* serta *Corporate Governance* terhadap *Tax Avoidance* telah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Hasil penelitian dari Rahmawati (2016) mengenai pengaruh pengungkapan *Corporate Social Responsibility* dan *Corporate Governance*

terhadap *tax avoidance* menyatakan bahwa *Corporate Social Responsibility* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, begitu pula dengan komisaris independen dan komite audit yang berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Hidayati dan Fidiana (2017) menyatakan bahwa pengungkapan tanggung jawab sosial yang dicerminkan oleh indeks pengungkapan *Corporate Social Responsibility* memberikan pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian, sedangkan untuk komisaris independen dan komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Berbeda dengan hasil penelitian Rahmawati serta Hidayati dan Fidiana, hasil penelitian Wahyudi (2015) menyatakan bahwa tingkat aktivitas *Corporate Social Responsibility* tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Berbeda dengan penelitian dari Wahyudi, hasil penelitian dari Hidayati dan Fidiana (2017) menyatakan bahwa pengungkapan tanggung jawab sosial yang dicerminkan oleh indeks pengungkapan *Corporate Social Responsibility* memberikan pengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Perbedaan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya inilah yang mendorong peneliti untuk menguji kembali konsistensi hasil penelitian terdahulu. Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan pertambangan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia. Alasan dipilihnya perusahaan pertambangan sebagai sampel dari penelitian ini yaitu karena sektor pertambangan memiliki kemungkinan yang besar untuk merusak lingkungan sehingga diperlukan tata kelola perusahaan yang baik serta memiliki kemungkinan untuk melakukan penghindaran pajak. Selain itu, kontribusi perusahaan pertambangan terhadap penerimaan negara tidak banyak, bahkan

beberapa tahun terakhir kontribusinya terus menurun. Data Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mencatat kepatuhan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan di sektor pertambangan terutama mineral dan batubara yaitu tahun 2014 perbandingan antara yang lapor dan tidak lapor yaitu 3795:4308 sedangkan pada tahun 2015 yaitu 3580:4523 (metrotvnews.com). *Tax avoidance* dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan *Current Effective Tax Rate (Current ETR)*.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh *Good Corporate Governance* dan *Corporate Social Responsibility* terhadap *Tax Avoidance* (Studi pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2016)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah penerapan *Good Corporate Governance* yang diproksi oleh komisaris independen dan komite audit serta *Corporate Social Responsibility* yang diproksi oleh *CSR Disclosure Index* berpengaruh secara simultan terhadap *tax avoidance* yang diproksi oleh *Current ETR* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2016?
2. Apakah komisaris independen berpengaruh secara parsial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2016?

3. Apakah komite audit berpengaruh secara parsial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2016?
4. Apakah *Corporate Social Responsibility* berpengaruh secara parsial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2016?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan pengaruh secara simultan dari penerapan *Good Corporate Governance* yang diproksi oleh komisaris independen dan komite audit serta *Corporate Social Responsibility* yang diproksi oleh *CSR Disclosure Index* terhadap *tax avoidance* yang diproksi oleh *Current ETR* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2016.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan apakah komisaris independen berpengaruh secara parsial terhadap *Tax Avoidance* perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2016.
3. Untuk mengetahui dan menjelaskan apakah komite audit berpengaruh secara parsial terhadap *Tax Avoidance* perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2016.

4. Untuk mengetahui dan menjelaskan apakah *Corporate Social Responsibility* berpengaruh secara parsial terhadap *Tax Avoidance* perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2016.

D. Kontribusi Penelitian

Berdasarkan tujuan peneliti, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi atau manfaat bagi beberapa pihak. Kontribusi dari penelitian ini dibagi menjadi 2 aspek, diantaranya yaitu:

1. Kontribusi Akademis

Penelitian ini merupakan salah satu bentuk penerapan dari ilmu yang telah penulis dapatkan di bangku kuliah sehingga diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan tambahan bagi peneliti maupun pihak yang membaca skripsi ini. Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi penelitian di masa yang akan datang, khususnya pada bidang *Good Corporate Governance*, *Corporate Social Responsibility* dan *Tax Avoidance*.

2. Kontribusi Praktis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini, perusahaan dapat mengetahui pengaruh *Good Corporate Governance* dan *Corporate Social Responsibility* terhadap *Tax Avoidance* sehingga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan *Good Corporate Governance* serta *Corporate Social Responsibility*.

E. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini terdapat 5 (lima) bab pembahasan yang menggunakan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan secara garis besar mengenai latar belakang masalah yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian ini. Dalam bab ini juga menguraikan tentang rumusan masalah, tujuan serta kontribusi dari penelitian serta sistematika penulisan penelitian ini

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang penjelasan teori-teori dasar yang relevan dengan penelitian. Bab ini juga menguraikan mengenai penelitian terdahulu dan kerangka teoritis yang menunjang penelitian serta menguraikan mengenai hipotesis penelitian ini

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang variabel penelitian, jenis dan sumber perolehan data, metode pengumpulan data, serta metode analisis data.

BAB IV : HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang deskripsi objek penelitian, analisis data, interpretasi hasil pengolahan data dan pembahasan mengenai hasil pengolahan data.

BAB V : PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan, keterbatasan serta saran untuk penelitian selanjutnya maupun perusahaan terkait.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Empiris

Dalam melaksanakan penelitian, penelitian terdahulu merupakan suatu komponen penting yang berguna untuk menunjang penelitian serta memperkuat kerangka berpikir dari peneliti. Penelitian yang digunakan sebagai acuan yaitu penelitian yang berhubungan dengan *Good Corporate Governance*, *Corporate Social Responsibility* dan *Tax Avoidance*. Penelitian terdahulu yang dijadikan referensi dalam penelitian ini diantaranya adalah:

1. Wahyudi (2015)

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki pengaruh aktivitas CSR terhadap penghindaran pajak di Indonesia. Penelitian ini menggunakan model analisis regresi berganda dengan variabel dependen adalah penghindaran pajak perusahaan, variabel independen adalah CSR serta beberapa variabel kontrol yang memiliki kemungkinan besar mempengaruhi penghindaran pajak diantaranya yaitu tingkat *leverage*, ukuran perusahaan, kualitas audit, komite audit, komisaris independen, dan kepemilikan publik. Sampel penelitian ini adalah perusahaan publik yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia untuk tahun 2012 yang berjumlah 42 perusahaan publik. Terkait dengan pengukuran proksi penghindaran pajak berupa *Cash ETR* dan *GAAP ETR*.

2. Rahmawati *et al.* (2016)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengungkapan *Corporate Social Responsibility* dan *Corporate Governance* terhadap penghindaran pajak. Variabel *Corporate Governance* diproksikan dengan proporsi komisaris independen, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, kualitas auditor eksternal, dan komite audit. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian eksplanatory. Sampel yang digunakan sebanyak 20 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2012-2014 dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder yang berupa laporan tahunan yang bersumber dari website Bursa Efek Indonesia.

3. Wijayanti *et al.* (2016)

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menguji pengaruh karakteristik perusahaan, *Good Corporate Governance* dan *Corporate Social Responsibility* terhadap penghindaran pajak. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2014. Pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling* sebanyak 21 perusahaan perbankan. Variabel yang digunakan adalah ukuran perusahaan, *leverage*, intensitas modal, komisaris independen, komite audit dan *Corporate Social Responsibility* sebagai variabel independen serta penghindaran pajak sebagai variabel dependen. Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

4. Eksandy (2017)

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh komisaris independen, komite audit, dan kualitas audit terhadap *tax avoidance*. Komisaris independen yang diukur dengan persentase jumlah komisaris independen terhadap jumlah total komisaris dalam susunan dewan komisaris perusahaan sampel, komite audit diukur dengan jumlah anggota komite audit dan kualitas audit diukur dengan variabel *dummy*. *Tax Avoidance* sebagai variabel dependen diukur dengan *cash effective tax rate (CETR)*. Penelitian ini menggunakan sampel sektor industri barang konsumsi periode 2010-2014. Dengan metode *purposive sampling* ada 14 perusahaan yang memenuhi kriteria dan menggunakan analisis regresi linear berganda (SPSS).

5. Hidayati dan Fidiana (2017)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *Corporate Social Responsibility (CSR)* dan *Good Corporate Governance* (komisaris independen, komite audit, kualitas audit) terhadap penghindaran pajak perusahaan. Sampel penelitian terdiri atas 11 perusahaan multinasional sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan jumlah pengamatan sebesar 44 dan dipilih secara *purposive sampling*. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda (*Multiple Regression Analysis*) dengan variabel independen *Corporate Social Responsibility* yang diproxykan dengan CSRDI, proporsi komisaris independen, jumlah komite audit, kualitas audit (ukuran KAP) terhadap penghindaran pajak yang diproxykan dengan *Current ETR*.

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Hasil
1.	Wahyudi (2015)	Analisis Empiris Pengaruh Aktivitas <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) terhadap Penghindaran Pajak di Indonesia	<p><u>Variabel independen:</u> <i>Corporate Social Responsibility</i></p> <p><u>Variabel dependen:</u> Penghindaran Pajak</p> <p><u>Variabel kontrol:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat <i>leverage</i> 2. Ukuran perusahaan 3. Kualitas audit 4. Komite audit 5. Komisaris independen 6. Kepemilikan publik 	Tingkat aktivitas <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak
2.	Rahmawati <i>et al.</i> (2016)	Pengaruh Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> dan <i>Corporate Governance</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i>	<p><u>Variabel independen:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengungkapan CSR 2. Kepemilikan manajerial 3. Kepemilikan Institusional 4. Dewan komisaris 5. Komite audit 6. Kualitas audit <p><u>Variabel dependen:</u> <i>Tax Avoidance</i></p>	Pengungkapan CSR berpengaruh positif signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> . Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> . Kepemilikan institusional berpengaruh negatif signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> . Dewan komisaris berpengaruh positif signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> , serta merupakan variabel yang dominan Komite audit berpengaruh positif

No	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Hasil
				tidak signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> . Kualitas audit berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> .
3.	Wijayanti <i>et al.</i> (2016)	Pengaruh Karakteristik Perusahaan, GCG dan CSR terhadap Penghindaran Pajak	<u>Variabel independen:</u> 1. Ukuran perusahaan 2. <i>Leverage</i> Intensitas modal 3. Komisaris independen 4. Komite audit 5. CSR <u>Variabel dependen:</u> Penghindaran pajak	Ukuran perusahaan dan intensitas modal berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan komisaris independen, komite audit dan CSR tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
4.	Eksandy (2017)	Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit dan Kualitas Audit terhadap Penghindaran Pajak (<i>Tax Avoidance</i>)	<u>Variabel independen:</u> 1. Komisaris independen 2. Komite audit 3. Kualitas audit <u>Variabel dependen:</u> Penghindaran pajak (<i>Tax Avoidance</i>)	1. Komisaris independen dan kualitas audit berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> 2. komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> . 3. Secara simultan komisaris independen, komite audit dan kualitas audit berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> .

No	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Hasil
5.	Hidayati dan Fidiana (2017)	Pengaruh <i>Corporate Social Responsibility</i> dan <i>Good Corporate Governance</i> terhadap Penghindaran Pajak	<u>Variabel independen:</u> 1. CSR 2. Komisaris independen 3. Komite audit 4. Kualitas audit <u>Variabel dependen:</u> penghindaran pajak	1. CSR berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, 2. Komisaris independen, komite audit, dan kualitas audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Sumber: Diolah peneliti, 2018

B. Tinjauan Teoritis

1. Teori Stakeholder

Teori ini menyatakan bahwa kesuksesan dan hidup-matinya suatu perusahaan sangat bergantung pada kemampuannya menyeimbangkan beragam kepentingan dari para *stakeholder* atau pemangku kepentingan. Jika mampu, maka perusahaan akan meraih dukungan yang berkelanjutan dan menikmati pertumbuhan pangsa pasar, penjualan, serta laba (Lako, 2011:5). Menurut Hadi (2014:95), perusahaan hendaknya menjaga reputasi yaitu dengan menggeser pola orientasi (tujuan) yang semula semata-mata diukur dengan *economic measurement* yang cenderung *shareholder orientation* ke arah memperhatikan faktor sosial (*social factors*) sebagai wujud kepedulian dan keberpihakan terhadap masalah sosial kemasyarakatan (*stakeholder orientation*).

2. Teori Legitimasi

Hadi (2014:87) menyatakan bahwa legitimasi merupakan keadaan psikologis keberpihakan orang dan kelompok orang yang sangat peka terhadap gejala lingkungan sekitarnya baik fisik maupun non fisik. O'Donovan dalam Hadi (2014:87) berpendapat bahwa legitimasi organisasi dapat dilihat sebagai sesuatu yang diberikan masyarakat kepada perusahaan dan sesuatu yang diinginkan/dicari perusahaan dari masyarakat, dengan demikian legitimasi merupakan manfaat/sumber daya potensial bagi perusahaan untuk bertahan hidup (*going concern*). Dalam perspektif teori legitimasi, perusahaan dan komunitas sekitarnya memiliki relasi sosial yang erat karena keduanya terkait dalam suatu "*social contract*" (Lako, 2011:5). Teori kontrak sosial sendiri menyatakan bahwa keberadaan perusahaan dalam suatu area karena didukung secara politis dan dijamin oleh regulasi pemerintah serta parlemen yang juga merupakan representasi dari masyarakat (Lako, 2011:6).

3. Teori Agensi

Menurut Sutedi (2012:13), teori agensi menekankan pentingnya pemilik perusahaan (pemegang saham) menyerahkan pengelolaan perusahaan kepada tenaga-tenaga profesional (disebut *agents*) yang lebih mengerti dalam menjalankan bisnis sehari-hari. Tujuan dari dipisahkannya pengelolaan dari kepemilikan perusahaan yaitu agar pemilik perusahaan memperoleh keuntungan

yang semaksimal mungkin dengan biaya yang seefisien mungkin dengan dikelolanya perusahaan oleh tenaga-tenaga profesional.

4. *Good Corporate Governance*

a. *Pengertian Good Corporate Governance*

Pengertian *Good Corporate Governance* menurut *World Bank* dalam Effendi (2016:2) adalah sebagai berikut:

“*Good Corporate Governance* adalah kumpulan hukum, peraturan, dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi, yang mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan untuk berfungsi secara efisien guna menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan.”

Dalam arti luas *Good Corporate Governance* digunakan untuk mengatur hubungan seluruh kepentingan *stakeholder* secara proporsional dan mencegah terjadinya kesalahan-kesalahan signifikan dalam strategi perusahaan sekaligus memastikan bahwa kesalahan yang terjadi dapat segera diperbaiki (Wibisono, 2007:10). Menurut Pramono dalam Wahyudi dan Azheri (2011: 153), konsep *Good Corporate Governance* pada dasarnya merupakan sistem pengelolaan perusahaan yang mencerminkan hubungan yang saling sinergi antara pengelola (manajemen) dengan *shareholder*, kreditur, pemerintah, *supplier*, dan *stakeholder* lainnya.

b. *Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance*

Terdapat 5 prinsip *Good Corporate Governance* yang dapat digunakan pelaku bisnis, diantaranya yaitu (Effendi, 2016:11-15):

1) Transparansi (*Transparancy*)

Transparansi mewajibkan adanya suatu informasi yang terbuka, tepat waktu, jelas, dan dapat diperbandingkan yang menyangkut keadaan keuangan, pengelolaan perusahaan, kinerja operasional dan kepemilikan perusahaan.

2) Akuntabilitas (*Accountability*)

Akuntabilitas dimaksudkan sebagai prinsip yang mengatur peran dan tanggung jawab manajemen agar dalam mengelola perusahaan dapat mempertanggungjawabkan serta mendukung usaha untuk menjamin penyeimbang kepentingan manajemen dan pemegang saham sebagaimana yang diawasi oleh dewan komisaris.

3) Responsibilitas (*Responsibility*)

Perusahaan memastikan pengelolaan perusahaan dengan mematuhi peraturan perundang-undangan serta ketentuan yang berlaku sebagaimana cerminan tanggung jawab korporasi sebagai warga korporasi yang baik. Perusahaan selalu mengupayakan kemitraan dengan semua pemangku kepentingan dalam batas-batas peraturan perundang-undangan dan etika bisnis yang sehat.

4) Independensi (*Independency*)

Perusahaan meyakini bahwa kemandirian merupakan keharusan agar organ perusahaan dapat bertugas dengan baik serta mampu membuat keputusan yang baik bagi perusahaan. Setiap organ perusahaan akan melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

yang berlaku dan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Selain itu, dalam organ perusahaan tidak boleh ada pihak yang dapat mencampuri pengurusan perusahaan

5) Kesetaraan (*Fairness*)

Kesetaraan mengandung makna bahwa terdapat perlakuan yang adil terhadap semua pemegang saham, termasuk investor asing dan pemegang saham minoritas. Prinsip ini menuntut adanya perlakuan yang adil dalam memenuhi hak *stakeholder* sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

c. Unsur-Unsur *Corporate Governance*

Terdapat unsur-unsur *Corporate Governance* yang berasal dari dalam perusahaan serta unsur-unsur yang ada di luar perusahaan yang menjamin berfungsinya *Good Corporate Governance* (Sutedi, 2012:41-42).

1) *Corporate Governance* - *Internal* Perusahaan

Unsur-unsur yang berasal dari dalam perusahaan dan unsur yang selalu diperlukan di dalam perusahaan diantaranya yaitu:

- a) Pemegang saham
- b) Direksi
- c) Dewan komisaris
- d) Manajer
- e) Karyawan/serikat pekerja
- f) Sistem remunerasi berdasar kinerja
- g) Komite audit

2) *Corporate Governance – External* Perusahaan

Unsur-unsur yang berasal dari luar perusahaan dan unsur yang selalu diperlukan diluar perusahaan diantaranya yaitu:

- a) Kecukupan undang-undang dan perangkat hukum
- b) Investor
- c) Institusi penyedia informasi
- d) Akuntan publik
- e) Institusi yang memihak kepentingan publik bukan golongan
- f) Pemberi pinjaman
- g) Lembaga yang mengesahkan legalitas

d. Komisaris Independen

Kedudukan komisaris independen pada dasarnya sama dengan anggota dewan komisaris lainnya, yakni sebagai badan pengawasan dan pemberi nasihat kepada direksi (Effendi, 2016:36). Hal yang membedakan dari komisaris independen dijelaskan dalam UU No 20 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 120 ayat (2). Pasal tersebut menjelaskan bahwa komisaris independen berasal dari kalangan luar perusahaan, tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris lainnya. Tugas komisaris independen dalam memastikan prinsip-prinsip dan praktik *Good Corporate Governance* dipatuhi dan diterapkan dengan baik, antara lain:

- 1) Menjamin transparansi dan keterbukaan laporan keuangan perusahaan;

- 2) Perlakuan yang adil terhadap pemegang saham minoritas dan pemangku kepentingan yang lain;
- 3) Diungkapnya transaksi yang mengandung konflik kepentingan secara wajar dan adil;
- 4) Kepatuhan perusahaan pada perundang-undangan dan peraturan yang berlaku;
- 5) Menjamin akuntabilitas organ perseroan;
- 6) Melakukan pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan direksi dalam pengelolaan perusahaan

e. Komite Audit

Ikatan Komite Audit Indonesia dalam Effendi (2016:48) mendefinisikan komite audit sebagai berikut:

“Suatu komite yang bekerja secara profesional dan independen yang dibentuk oleh dewan komisaris dan, dengan demikian tugasnya adalah membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris (atau dewan pengawas) dalam menjalankan fungsi pengawasan atas proses pelaporan keuangan, manajemen risiko pelaksanaan audit dan implementasi dari *corporate governance* di perusahaan-perusahaan.”

Menurut Hamdani (2016:92), komite audit bertugas membantu dewan komisaris untuk memastikan bahwa:

- 1) Laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum;
- 2) Struktur pengendalian internal perusahaan dilaksanakan dengan baik;
- 3) Pelaksanaan audit internal maupun eksternal dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku;
- 4) Tindaklanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh manajemen

Bagi perusahaan yang sahamnya tercatat di bursa efek, komite audit diketuai oleh komisaris independen dan anggotanya dapat terdiri dari komisaris dan atau pelaku profesi dari luar perusahaan serta salah seorang anggota memiliki latar belakang dan kemampuan akuntansi dan atau keuangan (Hamdani, 2016:93)

5. *Corporate Social Responsibility*

a. *Pengertian Corporate Social Responsibility*

Pengertian *Corporate Social Responsibility* menurut Wibisono (2007:8), adalah sebagai berikut:

“*Corporate Social Responsibility* dapat didefinisikan sebagai tanggung jawab perusahaan kepada para pemangku kepentingan untuk berlaku etis, meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif yang mencakup aspek ekonomi, sosial dan lingkungan (*triple bottom line*) dalam rangka mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.”

Sementara menurut lembaga *The World Business Council For Sustainable Development* dalam Rusdianto (2013:7), mendefinisikan *Corporate Social Responsibility* sebagai *Corporate Social Responsibility is the continuing commitment by business to behave ethical and contribute to economic development while improving the quality of life of the workforce and their families as well as of local community and society large*. Dengan kata lain, tanggung jawab sosial perusahaan merupakan komitmen dunia usaha untuk bertindak etis secara terus menerus dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi serta peningkatan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya sekaligus juga peningkatan

kualitas komunitas lokal dan masyarakat secara lebih luas Rusdianto (2013:7).

Corporate Social Responsibility merupakan suatu konsep kepedulian perusahaan yang didasari pada 3 prinsip dasar. Tiga prinsip dasar tersebut lebih dikenal dengan *triple bottom line*. Dalam Rusdianto (2013:8), ketiga prinsip dasar tersebut diantaranya yaitu:

- 1) *Profit*; perusahaan tetap harus berorientasi untuk mencari keuntungan (*profit*) untuk terus beroperasi dan berkembang.
- 2) *People*; perusahaan dalam hal ini harus memiliki kepedulian terhadap kesejahteraan manusia.
- 3) *Planet*; pentingnya perusahaan untuk peduli terhadap lingkungan hidup dan keberlanjutan keanekaragaman hayati.

b. Manfaat *Corporate Social Responsibility*

Beberapa manfaat *Corporate Social Responsibility* bagi perusahaan yang menerapkannya yaitu (Rusdianto, 2013:13):

- 1) Membangun dan menjaga reputasi perusahaan
- 2) Meningkatkan citra perusahaan
- 3) Mengurangi resiko bisnis perusahaan
- 4) Melebarkan cakupan bisnis perusahaan
- 5) Mempertahankan posisi merek perusahaan
- 6) Mempertahankan Sumber Daya Manusia yang berkualitas
- 7) Kemudahan memperoleh akses terhadap modal (*capital*)
- 8) Meningkatkan pengambilan keputusan pada hal-hal yang kritis

9) Mempermudah pengelolaan manajemen resiko (*risk management*)

Sedangkan bagi masyarakat, praktik *Corporate Social Responsibility* yang baik akan meningkatkan nilai tambah adanya perusahaan di suatu daerah karena akan menyerap tenaga kerja serta meningkatkan kualitas sosial di daerah tersebut (Rusdianto, 2013:13).

c. Pelaporan Program *Corporate Social Responsibility*

Perusahaan yang telah melaksanakan program *Corporate Social Responsibility* idealnya membuat laporan yang dapat digunakan sebagai bahan untuk evaluasi serta dapat juga dijadikan sebagai alat komunikasi dengan *shareholder* dan *stakeholder* (Wibisono, 2007:152). Menurut Hadi (2014:206), laporan tanggungjawab sosial merupakan aktivitas tanggungjawab sosial yang telah dilakukan perusahaan baik berkaitan dengan perhatian masalah dampak sosial maupun lingkungan. Laporan tersebut menjadi bagaian tak terpisahkan dengan laporan tahunan (*annual report*) yang dipertanggungjawabkan direksi di depan sidang Rapat Umum Pemegang Saham. Laporan ini berisi laporan program-program sosial dan lingkungan perseroan yang telah dilaksanakan selama tahun buku berakhir. Menurut Wibisono (2007:155), pada umumnya format laporan mengandung unsur-unsur:

- 1) CEO *statement*
- 2) Profil perusahaan
- 3) Ruang lingkup
- 4) Dampak

- 5) Tata kelola
- 6) Kebijakan-kebijakan
- 7) Sistem manajemen dan prosedur
- 8) Hubungan dengan *stakeholder*
- 9) Kinerja dan pemenuhan terhadap standar
- 10) Target dan pencapaian
- 11) Penghargaan-penghargaan

6. *Tax Avoidance*

Menurut Suandy (2017:21), penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah suatu usaha pengurangan secara legal yang dilakukan dengan cara memanfaatkan ketentuan-ketentuan di bidang perpajakan secara optimal, seperti pengecualian dan pemotongan-pemotongan yang diperkenankan maupun manfaat hal-hal yang belum diatur dan kelemahan-kelemahan yang ada dalam peraturan perpajakan yang berlaku. Menurut Suandy (2014:2) terdapat beberapa faktor yang memotivasi Wajib Pajak untuk melakukan penghematan pajak dengan ilegal, yaitu:

- a. Jumlah pajak yang harus dibayar.

Besarnya jumlah pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak, semakin besar pajak yang harus dibayar, semakin besar pula kecenderungan Wajib Pajak untuk melakukan pelanggaran.

b. Biaya untuk menyuap fiskus.

Semakin kecil biaya untuk menyuap fiskus, semakin besar kecenderungan Wajib Pajak untuk melakukan pelanggaran.

c. Kemungkinan untuk ketahuan.

Semakin kecil kemungkinan suatu pelanggaran terdeteksi, semakin besar kecenderungan Wajib Pajak untuk melakukan pelanggaran.

d. Besar sanksi.

Semakin ringan sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran, semakin besar kecenderungan Wajib Pajak untuk melakukan pelanggaran.

Penghindaran pajak merupakan salah satu bentuk dari perlawanan aktif. Perlawanan aktif ini merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh Wajib Pajak untuk tidak membayar pajak atau mengurangi jumlah pajak yang seharusnya dibayar. Perlawanan aktif terdiri dari 2, yaitu *tax avoidance* dan *tax evasion* (Suandy, 2017:21).

Perbedaan yang ada diantara *tax avoidance* dan *tax evasion* yaitu *tax avoidance* menunjuk pada rekayasa *tax affairs* yang masih dalam bingkai ketentuan perpajakan, sedangkan *tax evasion* berada di luar bingkai peraturan perpajakan (Pohan, 2011:17). Upaya dalam meminimalkan jumlah pajak secara legal dapat dilakukan melalui pemilihan aktivitas *Corporate Social Responsibility* yang diperbolehkan untuk dijadikan sebagai pengurang penghasilan bruto perusahaan sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan, diantaranya yaitu:

a. Biaya pengolahan limbah;

- b. Biaya beasiswa, magang dan pelatihan;
- c. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang diatur dalam Peraturan Pemerintah;
- d. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang diatur dalam Peraturan Pemerintah;
- e. Biaya pembangunan infrastruktur sosial yang diatur dalam Peraturan Pemerintah;
- f. Sumbangan fasilitas pendidikan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah;
- g. Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.

C. Pengaruh Antar Variabel

1. Pengaruh Komisaris Independen terhadap *Tax Avoidance*

Tugas komisaris independen adalah memastikan bahwa prinsip-prinsip serta praktik *Good Corporate Governance* dipatuhi serta diterapkan dengan baik (Effendi, 2016:36). Komisaris independen hendaknya dapat berperan secara efektif melalui komite audit untuk melakukan deteksi dini (*early warning*) adanya potensi penyimpangan ataupun kecurangan (*fraud*) di perusahaan publik, karena komisaris independen biasanya juga berperan sebagai ketua komite audit (Effendi, 2016:38). Semakin besar proporsi komisaris independen maka diharapkan perusahaan tersebut semakin tidak melakukan *tax avoidance*.

2. Pengaruh Komite Audit terhadap *Tax Avoidance*

Tugas utama komite audit termasuk pemeriksaan dan pengawasan tentang proses pelaporan keuangan dan kontrol internal. Keberadaan komite audit yang mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja operasional tidak berjalan dengan baik. Peran komite audit yang baik diduga dapat mendorong kepatuhan perusahaan sebagai wajib pajak badan untuk menjalankan kewajiban perpajakannya. Semakin banyak jumlah anggota komite audit diharapkan tingkat penghindaran pajaknya semakin rendah. Hasil penelitian dari Annisa dan Kurniasih (2012) menyatakan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*.

3. Pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap *Tax Avoidance*

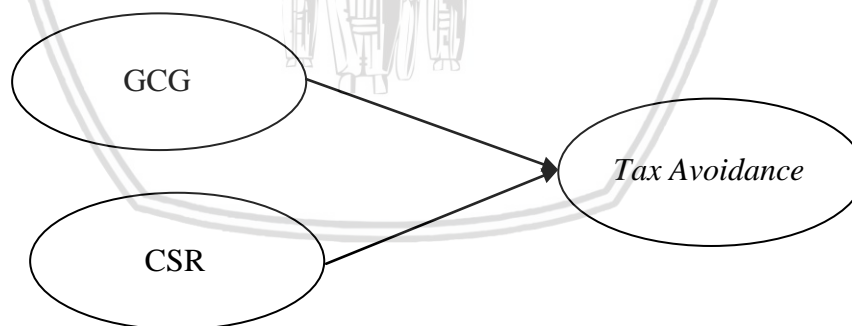
Corporate Social Responsibility merupakan suatu perwujudan tanggung jawab perusahaan kepada lingkungan serta masyarakat disekitar perusahaan tersebut didirikan. Penerapan *Corporate Social Responsibility* dapat memberikan manfaat bagi perusahaan, salah satunya yaitu perusahaan dapat mempertahankan keberlanjutan usahanya. Hal ini di karenakan perusahaan tersebut bertindak secara etis dengan memperhatikan faktor sosial serta lingkungan dimana perusahaan tersebut didirikan.

Selain itu, perusahaan memiliki kewajiban untuk membayarkan beban pajaknya. Dampak yang ditimbulkan dari pembayaran beban pajak tersebut yaitu berkurangnya laba perusahaan. Untuk itu, perusahaan berusaha untuk meminimalkan beban pajak perusahaan dengan melakukan penghindaran

pajak. Salah satu cara penghindaran pajak yaitu melalui *Corporate Social Responsibility*, karena di dalam *Corporate Social Responsibility* terdapat biaya-biaya yang dapat dikurangkan sehingga dapat menyebabkan beban pajak menjadi semakin sedikit. Hasil penelitian Lanis dan Richardson (2012) yang menguji hubungan *Corporate Social Responsibility* dan agresivitas pajak mengungkapkan bahwa dengan pengungkapan *Corporate Social Responsibility* dapat mengurangi tindakan agresivitas pajak. Dengan kata lain bahwa pengungkapan *Corporate Social Responsibility* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

D. Model Konsep

Untuk memerikan kemudahan peneliti dalam melakukan analisis, maka gambaran model konsep dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

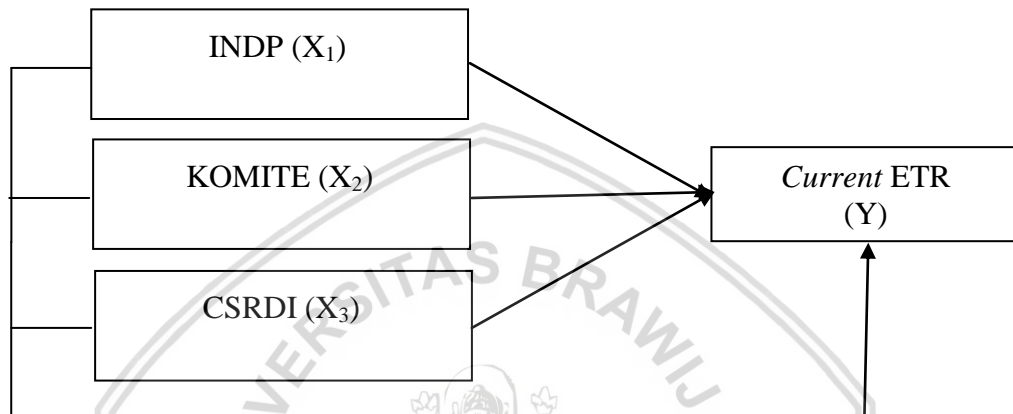


Gambar 1. Model Konsep

Sumber: Diolah peneliti, 2018

E. Model Hipotesis

Model hipotesis merupakan bentuk dugaan sementara dari peneliti mengenai penelitian yang sedang diteliti. Hipotesis mengenai penelitian ini apabila digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2. Model Hipotesis

Sumber: Diolah peneliti, 2018

Keterangan:

→ : Berpengaruh secara parsial
 ⇨ : Berpengaruh secara bersama-sama

INDP : Komisaris Independen

KOMITE : Komite Audit

CSRDI : *Corporate Social Responsibility Disclosure Index*

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel independen diantaranya yaitu *Corporate Social Responsibility Disclosure Index*, komisaris independen, dan komite audit sedangkan yang menjadi variabel dependen yaitu *tax avoidance*. Berdasarkan model hipotesis maka hipotesis yang diajukan yaitu:

1. Hipotesis Pertama

H₁: Komisaris Independen (X₁), Komite Audit (X₂), dan *Corporate Social Responsibility* (X₃) secara simultan berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*

2. Hipotesis Kedua

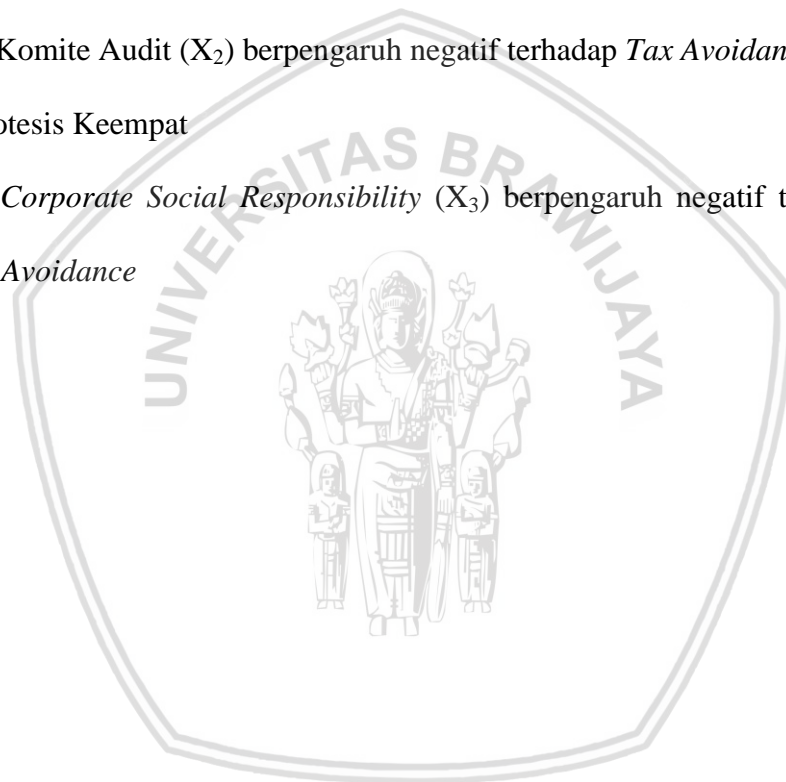
H₂: Komisaris Independen (X₁) berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*

3. Hipotesis Ketiga

H₃: Komite Audit (X₂) berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*

4. Hipotesis Keempat

H₄: *Corporate Social Responsibility* (X₃) berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan eksplanatif. Penelitian kuantitatif merupakan metode-metode untuk menguji teori-teori tertentu dengan cara meneliti hubungan antar variabel (Creswell, 2014:5). Sedangkan, penelitian eksplanatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menghubungkan atau menjelaskan antara 2 variabel serta membuktikan hipotesis atau menguji sebuah teori (Zulganef, 2013:119-120).

B. Identifikasi Variabel dan Definisi Operasional Variabel

1. Identifikasi Variabel

Variabel merupakan suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudain ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2016:38).

Tabel 2. Keterangan Perhitungan Variabel

No	Variabel Penelitian	Perhitungan Variabel
1.	Komisaris Independen	$\frac{\text{Jumlah Komisaris Independen}}{\text{Total Dewan Komisaris}} \times 100\%$
2.	Komite Audit	Ln Jumlah Komite Audit
3.	<i>Corporate Social Responsibility</i>	$CSRDI_i = \frac{\sum X_i}{n}$

No	Variabel Penelitian	Perhitungan Variabel
		Keterangan: $CSRDI_i$: <i>CSR Disclosure Index</i> perusahaan i $\sum X_i$: Jumlah item bernilai 1 pada perusahaan i. n : Jumlah seluruh item indikator pengungkapan CSR

Sumber: Bakhri dalam Oktovian, 2015; Wijayanti *et al.*, 2016; Hidayati dan Fidiana, 2017.

Untuk menguji hipotesis yang diajukan, variabel yang diteliti dalam penelitian ini dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu variabel dependen dan variabel independen. Kedua variabel tersebut diuraikan sebagai berikut:

a. Variabel Dependen (Y)

Variabel dependen sering disebut sebagai variabel output, kriteria, atau konsekuen. Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel independen (Sugiyono, 2016:39). Variabel dependen (Y) dalam penelitian ini adalah *Tax Avoidance*.

1) *Tax Avoidance*

Tax avoidance dapat diukur dengan berbagai pendekatan diantaranya adalah *Effective Tax Rates (ETR)*, *Generally Accepted Accounting Principles ETR (GAAP ETR)*, *Current ETR*, serta *Book Tax Different*. Dalam penelitian ini, *tax avoidance* diproksikan menggunakan rasio *Current ETR*. *Current ETR* dalam penelitian ini menggunakan model utama yang digunakan Hanlon dan Heitzman (2010), yaitu pajak penghasilan kini dibagi dengan total laba sebelum pajak perusahaan. Rasio *Current ETR* diukur dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Current ETR} = \frac{\text{Pajak Kini}}{\text{Total Laba Sebelum Pajak}}$$

Sumber: Hidayati dan Fidiana, 2017

Besarnya pajak kini perusahaan dapat dilihat pada laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit dalam laporan laba/rugi. Apabila nilai pajak kini tidak disajikan secara spesifik dalam laporan laba/rugi, dapat dilihat pada catatan atas laporan keuangan. Sedangkan total laba sebelum pajak dapat dilihat pada laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit dalam laporan laba/rugi.

b. Variabel Independen (X)

Variabel ini sering disebut dengan variabel *stimulus*, *prediktor*, atau *antecedent*. Variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen (Sugiyono, 2016:39). Variabel independen dalam penelitian ini adalah komisararis independen, komite audit dan *Corporate Social Responsibility*.

1) **Komisaris Independen (X₁)**

Komisaris independen yang dimaksudkan dalam penelitian ini merupakan anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota direksi, dan/atau anggota dewan komisaris lainnya (Effendi, 2016:36). Perusahaan dapat mempunyai dewan komisaris yang hanya terdiri dari 1 (satu) orang, tetapi dapat pula lebih dari satu anggota (Prasetya, 2014:31). Keputusan Bursa Efek Indonesia No Kep-05/BEJ/07-2004 tentang Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham Dan Efek

Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat, menegaskan bahwa setiap perusahaan publik harus memiliki komisaris independen sekurang-kurangnya 30% dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris. Komisaris independen dalam penelitian ini diukur melalui proporsi komisaris independen (INDP) yang dihitung dengan menggunakan rumus:

$$INDP = \frac{\text{Jumlah Komisaris Independen}}{\text{Total Dewan Komisaris}} \times 100\%$$

Sumber: Bakhri dalam Oktovian, 2015

Jumlah komisaris independen serta total dewan komisaris dapat dilihat pada laporan keuangan yang telah diaudit bagian informasi umum perusahaan atau pada laporan tahunan perusahaan.

2) Komite Audit (X₂)

Komite audit adalah suatu komite yang beranggotakan satu atau lebih Dewan Komisaris dan dapat meminta kalangan luar dengan berbagai keahlian, pengalaman, dan kualitas lain yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan komite audit. Tugas utama komite audit menurut Komite Nasional *Good Corporate Governance* merupakan membantu Dewan Komisaris dalam hal pemeriksaan dan pengawasan tentang proses pelaporan keuangan dan kontrol internal (Effendi, 2016:55). Keanggotaan komite audit sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang anggota, seorang diantaranya merupakan komisaris independen yang sekaligus merangkap sebagai ketua komite audit, sedangkan anggota lainnya merupakan pihak ekstern yang independen dimana sekurang-kurangnya satu diantaranya memiliki

kemampuan di bidang akuntansi dan atau keuangan (Effendi, 2016:55). Jumlah komite audit dapat dilihat pada laporan keuangan yang telah diaudit bagian informasi umum perusahaan atau pada laporan tahunan perusahaan. Perhitungan komite audit diukur dengan menggunakan jumlah komite audit perusahaan.

$$KOMITE = \ln \Sigma \text{Komite Audit}$$

Sumber: Shahibah dalam Syafitri *et al.*, 2018

3) *Corporate Social Responsibility* (X_3)

Corporate Social Responsibility dalam penelitian ini diprosikan menggunakan rasio pengungkapan *Corporate Social Responsibility* atau *CSR Disclosure Index* (CSRDI). Penelitian ini menggunakan tabel *checklist* dengan indikator pengungkapan *Corporate Social Responsibility* yang dikeluarkan oleh *Global Reporting Initiative* (GRI). GRI yang digunakan dalam penelitian ini yaitu GRI 4.0 dengan jumlah indikator sebanyak 91 item. Pengukuran pengungkapan *Corporate Social Responsibility* ini menggunakan variabel *dummy*. Hal ini dilakukan dengan mencocokkan pengungkapan yang dilakukan perusahaan dengan tabel *checklist*. Apabila item dalam tabel *checklist* diungkapkan oleh perusahaan maka diberi nilai 1, apabila tidak diungkapkan diberi nilai 0. Kemudian dijumlahkan semua item yang bernilai 1 dari perusahaan, kemudian dibandingkan dengan jumlah seluruh item pada tabel *checklist*. Banyaknya pengungkapan *Corporate Social Responsibility* dapat dilihat dalam laporan tahunan perusahaan. Rumus pengukuran rasio *CSR disclosure* adalah sebagai berikut:

$$CSRDI_i = \frac{\sum X_i}{n}$$

Sumber: Hidayati dan Fidiana, 2017

Keterangan:

CSRDI_i : CSR *Disclosure Index* perusahaan i.

ΣXi : Jumlah item bernilai 1 pada perusahaan i.

n : Jumlah seluruh item indikator pengungkapan CSR (91 item)

2. Definisi Operasional Variabel

Tabel 3. Definisi Operasional Variabel

No	Konsep	Variabel	Indikator
1.	<i>Good Corporate Governance</i>	X ₁ : Komisaris Independen	Jumlah Komisaris Independen dibagi dengan total Dewan Komisaris
		X ₂ : Komite Audit	ln Jumlah Komite Audit
2.	<i>Corporate Social Responsibility</i>	X ₃ : <i>Corporate Social Responsibility Disclosure</i>	<i>Corporate Social Responsibility Disclosure Index</i> (CSRDI) dengan menggunakan 91 item pengukuran
3.	<i>Tax Avoidance</i>	Y: <i>Tax Avoidance</i>	<i>Current ETR</i> (pajak kini dibagi dengan total laba sebelum pajak)

Sumber: Bakhri dalam Oktovian, 2015; Wijayanti *et al.*, 2016; Hidayati dan Fidiana, 2017

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan atau totalitas objek yang diteliti.

Populasi dapat berupa orang, kelompok, organisasi, komunitas orang atau

masyarakat (Neolaka, 2014:41). Dalam penelitian ini populasi yang digunakan yaitu semua perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2014-2016 yang berjumlah 41 perusahaan. Alasan pemilihan perusahaan di sektor pertambangan yaitu karena sektor pertambangan memiliki kemungkinan yang besar untuk merusak lingkungan sehingga diperlukan tata kelola perusahaan yang baik serta memiliki kemungkinan untuk melakukan penghindaran pajak. Selain itu, kontribusi perusahaan pertambangan terhadap penerimaan negara tidak banyak, bahkan dalam beberapa tahun terakhir kontribusinya terus menurun. Data Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mencatat kepatuhan pelaporan SPT Tahunan di sektor pertambangan terutama minerba yaitu tahun 2014 perbandingan antara yang lapor dan tidak lapor yaitu 3795:4308 sedangkan pada tahun 2015 yaitu 3580:4523 (metrotvnews.com).

2. Sampel

Sampel adalah sebagian anggota/elemen dari populasi yang mewakili karakteristik populasi (Riadi, 2016:34). Metode yang digunakan dalam pengambilan sampel pada penelitian ini adalah metode *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah metode untuk memperoleh informasi dan sasaran-sasaran sampel tertentu yang disengaja oleh peneliti, karena hanya sampel tersebut saja yang mewakili (Zulganef, 2013:146). Sampel pada penelitian ini adalah sebanyak 11 perusahaan dari populasi 41 perusahaan. Adapun kriteria dalam penetapan sampel diantaranya yaitu:

- a. Perusahaan pertambangan yang menerbitkan laporan keuangan serta laporan tahunan pada tahun 2014-2016
- b. Perusahaan yang tidak mengalami kerugian pada tahun 2014-2016
- c. Perusahaan memiliki kelengkapan data variabel-variabel yang digunakan yaitu komisaris independen (X_1) yang terdiri dari jumlah anggota komisaris independen serta total dewan komisaris, komite audit (X_2) yang terdiri dari jumlah komite audit, *Corporate Social Responsibility* yang berupa pengungkapan *Corporate Social Responsibility* perusahaan, dan *tax avoidance* yang terdiri dari pajak kini serta total laba sebelum pajak.
- d. Perusahaan yang *listing* sebelum periode yang diteliti serta tidak *delisting* selama periode yang diteliti

Tabel 4. Kriteria Pemilihan Sampel

No	Kriteria Sampel	Jumlah Perusahaan
1.	Perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI pada tahun 2014-2016	41
2.	Perusahaan pertambangan yang tidak menerbitkan laporan keuangan serta laporan tahunan secara lengkap pada tahun 2014-2016	(4)
3.	Perusahaan yang mengalami kerugian pada tahun 2014-2016	(18)
4.	Perusahaan tidak memiliki kelengkapan data variabel-variabel yang digunakan	(6)
5.	Perusahaan yang baru <i>listing</i> pada periode yang diteliti serta <i>delisting</i> selama periode yang diteliti	(2)
6.	Jumlah perusahaan yang dijadikan sampel	11
7.	Jumlah observasi 11 (perusahaan) x 3 (2014-2016)	33

Sumber: Diolah peneliti, 2018

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Pengertian data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna jasa (Hanke & Reitsch dalam Kuncoro, 2009:148).

2. Sumber Data

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang berasal dari laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan tahunan dari perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2016 yang diperoleh melalui *website* resmi Bursa Efek Indonesia yaitu www.idx.co.id dan *website* resmi perusahaan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang merupakan data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik dokumentasi yaitu dengan mengumpulkan, mencatat dan menganalisis data sekunder yang berupa laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan tahunan perusahaan pertambangan yang telah dipublikasikan oleh Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014-2016.

F. Teknik Analisis Data

1. Uji Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang mempunyai tugas mengorganisasi dan menganalisa data angka, agar dapat memberikan gambaran secara teratur, ringkas dan jelas mengenai suatu gejala, peristiwa atau keadaan sehingga dapat ditarik pengertian atau makna tertentu (Sudjino dalam Sudarmanto, 2013:150). Statistik deskriptif ini berfungsi untuk mendiskripsikan atau memberikan gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel atau populasi sebagaimana adanya, tanpa membuat kesimpulan yang berlaku umum (Sugiyono dalam Sudarmanto, 2013: 150). Menurut Priyatno (2016:10), analisis deskriptif adalah analisis yang digunakan untuk menggambarkan tentang ringkasan data-data penelitian seperti mean, minimum, maksimum, dan standar deviasi.

2. Uji Asumsi Klasik

Menurut Sudrajat dalam Priyatno (2016:117), pengujian asumsi klasik diperlukan untuk mengetahui apakah hasil estimasi regresi yang dilakukan benar-benar bebas dari adanya gejala heteroskedastisitas, multikolinearitas dan autokorelasi. Model regresi akan dapat dijadikan alat estimasi yang tidak bias jika telah memenuhi persyaratan *best linear unbiased estimator* yakni tidak terdapat heteroskedastisitas, multikolinearitas dan autokorelasi. Berikut ini adalah uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini:

a. Uji Normalitas

Uji normalitas data merupakan uji distribusi data yang akan dianalisis, apakah penyebarannya normal atau tidak, sehingga dapat digunakan dalam analisis parametrik (Lupiyoadi dan Ikhsan, 2015:134). Pengambilan keputusan untuk uji normalitas dengan menggunakan metode *One Kolmogorov-Smirnov Z* adalah sebagai berikut (Priyatno, 2016:125):

- 1) Jika Signifikansi (Asymp.sig) $> 0,05$ maka data residual terdistribusi normal
- 2) Jika Signifikansi (Asymp.sig) $< 0,05$ maka data residual tidak terdistribusi normal

Sedangkan pengambilan keputusan untuk mendeteksi kenormalan dengan metode *Normal Probability Plots* adalah jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah diagonal, maka residual terdistribusi normal (Priyatno, 2016:128).

b. Uji Multikolonieritas

Multikolonieritas adalah keadaan dimana antara dua variabel independen atau lebih pada model regresi terjadi hubungan linier yang sempurna (Priyatno, 2016:129). Adanya gejala multikolonieritas dapat dilihat dari *tolerance value* atau nilai *Variance Inflation Factor* (VIF). Batas *tolerance value* adalah 0,1 dan batas VIF adalah 10. Dasar pengambilan keputusan dari uji multikolonieritas yaitu (Priyatno, 2016:131):

- 1) Apabila *tolerance value* $> 0,1$ dan VIF < 10 maka tidak terjadi multikolonieritas.

- 2) Apabila *tolerance value* $< 0,1$ atau *VIF* >10 maka terjadi multikolinearitas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji asumsi heteroskedastisitas dimaksudkan untuk mengetahui apakah variasi residual absolut sama atau tidak sama untuk semua pengamatan (Sudarmanto, 2013:240). Model regresi yang baik mensyaratkan tidak adanya masalah heteroskedastisitas. Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas terdapat beberapa metode, antara lain dengan cara uji *Spearman's rho*, uji *Park*, uji *Glejser*, dan dengan melihat pola pada titik-titik pada *scatterplots* regresi (Priyatno, 2016:131). Dalam penelitian ini untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas menggunakan *scatterplots*, dasar analisisnya yaitu (Ghozali, 2016:134):

- 1) Jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang membentuk pola tertentu yang teratur, maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
- 2) Jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

d. Uji Autokorelasi

Autokorelasi merupakan korelasi antara anggota seri observasi yang disusun menurut urutan waktu atau urutan tempat/ruang (*data cross section*) atau korelasi yang timbul pada dirinya sendiri (Sugiarto dalam Sudarmanto, 2013:263). Uji asumsi mengenai autokorelasi sangat penting untuk dilakukan tidak hanya pada data yang bersifat *time series* saja tetapi semua data (variabel independen) yang diperoleh perlu diuji terlebih dahulu

autokorelasinya apabila akan dianalisis dengan regresi linier berganda. Menurut Sudarmanto (2013:263), pengujian autokorelasi ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah terjadi korelasi diantara data pengamatan atau tidak. Dasar pengambilan keputusan dari ada tidaknya autokorelasi melalui uji Durbin-Watson yaitu sebagai berikut (Ghozali, 2017:108):

Tabel 5. Pengambilan Keputusan Autokorelasi

Hipotesis Nol	Keputusan	Jika
Tidak ada autokorelasi positif	Tolak	$0 < d < dl$
Tidak ada autokorelasi positif	<i>No decision</i>	$dl \leq d \leq du$
Tidak ada autokorelasi negatif	Tolak	$4-dl < d < 4$
Tidak ada autokorelasi negatif	<i>No decision</i>	$4-du \leq d \leq 4-dl$
Tidak ada autokorelasi positif atau negatif	Tidak ditolak	$du < d < 4-du$

Sumber: Ghozali, 2017

3. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda merupakan analisis statistik yang menghubungkan antara dua variabel independen atau lebih (X_1, X_2, \dots, X_n) dengan variabel dependen Y (Lupiyoadi dan Ikhsan, 2015:157). Tujuan analisis regresi linier berganda adalah untuk mengukur intensitas hubungan antara dua variabel atau lebih dan membuat perkiraan nilai Y atas X (Lupiyoadi dan Ikhsan, 2015:158). Secara umum model regresi linier berganda adalah sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \dots + \beta_n X_n + e$$

Sedangkan persamaan regresi untuk penelitian ini yaitu:

$$\text{Current ETR} = \alpha + \beta_1 \text{INDP} + \beta_2 \text{KOMITE} + \beta_3 \text{CSRDI} + e$$

Keterangan:

Current ETR : *Tax Avoidance*

α : titik potong garis dengan sumbu Y

β_1 : koefisien regresi Komisaris Independen

INDP : Komisaris Independen

β_2 : koefisien regresi Komite Audit

KOMITE : Komite Audit

β_3 : koefisien regresi CSRDI

CSRDI : *Corporate Social Responsibility Disclosure Index*

e : standar *error*

4. Uji Hipotesis

Menurut Hasan (2012:140), pengujian hipotesis adalah suatu prosedur yang akan menghasilkan suatu keputusan, yaitu keputusan menerima atau menolak hipotesis. Dalam pengujian hipotesis, keputusan yang dibuat mengandung ketidakpastian, artinya keputusan bisa benar atau salah, sehingga menimbulkan resiko. Besar kecilnya resiko dinyatakan dalam bentuk probabilitas. Tujuan dari pengujian hipotesis yaitu untuk mendapatkan bukti yang cukup apakah kesimpulan yang diperoleh dari sampel mencerminkan kondisi sebenarnya dari populasi (Suharyadi dan Purwanto, 2015:156).

a. Koefisien Determinasi (R^2)

Menurut Suharyadi dan Purwanto (2015:217), koefisien determinasi (R^2) merupakan ukuran untuk mengetahui kesesuaian atau ketepatan hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen dalam suatu persamaan regresi. Dengan kata lain, koefisien determinasi menunjukkan kemampuan variabel X yang merupakan variabel independen menerangkan atau menjelaskan variabel Y yang merupakan variabel dependen. Semakin besar nilai koefisien determinasi, semakin baik kemampuan variabel X menerangkan atau menjelaskan variabel Y. Nilai R^2 akan berkisar antara 0 sampai 1.

b. Uji F

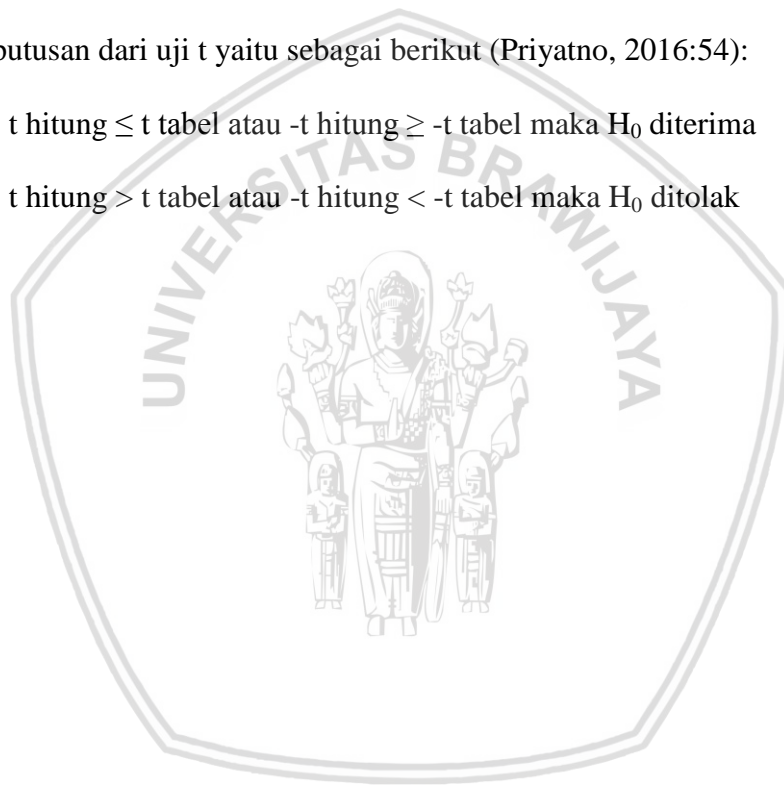
Menurut Suharyadi dan Purwanto (2015:225), uji signifikansi serentak atau Uji F dimaksudkan untuk melihat kemampuan menyeluruh dari variabel independen (X_1, X_2, \dots, X_n) dapat atau mampu menjelaskan tingkah laku atau keragaman variabel dependen (Y). Uji F juga dimaksudkan untuk mengetahui apakah semua variabel independen memiliki koefisien regresi sama dengan nol. Pengambilan keputusan dari uji F yaitu sebagai berikut (Suharyadi dan Purwanto, 2015:227):

- 1) $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka H_0 ditolak
- 2) $F_{hitung} < F_{tabel}$, maka H_0 diterima

c. Uji t

Menurut Suharyadi dan Purwanto (2015:228), uji t digunakan untuk menguji apakah suatu variabel independen berpengaruh atau tidak terhadap variabel dependen. Dalam pengujian ini ingin diketahui apakah jika secara terpisah suatu variabel X masih memberikan kontribusi secara signifikan terhadap variabel Y (Lupiyoadi dan Ikhsan, 2015:168). Pengambilan keputusan dari uji t yaitu sebagai berikut (Priyatno, 2016:54):

- 1) $t \text{ hitung} \leq t \text{ tabel}$ atau $-t \text{ hitung} \geq -t \text{ tabel}$ maka H_0 diterima
- 2) $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$ atau $-t \text{ hitung} < -t \text{ tabel}$ maka H_0 ditolak



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2014-2016. Jumlah populasi dari perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia adalah sebanyak 41 perusahaan. Sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Berdasarkan kriteria pemilihan sampel, maka diperoleh sampel penelitian sebanyak 11 perusahaan pertambangan selama periode tahun 2014-2016 sehingga diperoleh data sebanyak 33 laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan yang diperoleh melalui *website* Bursa Efek Indonesia maupun *website* perusahaan. Berikut ini merupakan daftar nama perusahaan pertambangan yang memenuhi kriteria sampel:

Tabel 6. Daftar Nama Perusahaan yang Memenuhi Kriteria Sampel

No	Perusahaan	Kode
1.	Citatah Tbk	CTTH
2.	J Resources Asia Pasific Tbk	PSAB
3.	Radiant Utama Interinsco Tbk	RUIS
4.	Adaro Energy Tbk	ADRO
5.	Baramulti Suksessarana Tbk	BSSR
6.	Darma Henwa Tbk	DEWA
7.	Indo Tambangraya Megah Tbk	ITMG
8.	Resource Alam Indonesia Tbk	KKGI
9.	Samindo Resources Tbk	MYOH
10.	Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk	PTBA
11.	Toba Bara Sejahtera Tbk	TOBA

Sumber: Diolah peneliti, 2018



B. Profil Singkat Perusahaan Sampel Penelitian

Berikut ini merupakan perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014-2016 yang dijadikan sebagai sampel penelitian:

1. Citatah Tbk (CTTH)

PT Citatah Tbk adalah perusahaan swasta pertama yang mengembangkan sumber-sumber marmer Indonesia serta bergerak di bidang ekstraksi dan pemrosesan marmer selama kurun waktu lebih dari empat puluh tahun. Sejak 2009, perusahaan telah melebarkan bisnis penjualan domestik yang meliputi pemasaran beragam produk pelapis permukaan untuk memenuhi kebutuhan perkembangan pasar konstruksi di Indonesia. Kini, perusahaan merupakan produsen marmer terbesar di Indonesia, serta menjadi agen tunggal produk-produk pelapis permukaan internasional yang terkenal termasuk Bisazza, Caesarstone dan Priante.

2. J Resources Asia Pasifik Tbk (PSAB)

PT J Resources Asia Pasifik Tbk. adalah perusahaan publik tambang emas Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan kode ticker "PSAB". Perseroan memiliki delapan proyek inti, empat di antaranya adalah tambang dalam pengembangan dan eksplorasi. Semua proyek terletak di Indonesia, dengan pengecualian proyek Penjom yang terletak di Negeri bagian Pahang di semenanjung Malaysia, masih dalam pusran sabuk emas. Aset produktif utama adalah proyek Bakan di Sulawesi Utara dan proyek Seruyung di Kalimantan Utara. Aset produktif sekunder adalah proyek Penjom di Malaysia dan proyek

Lanut Utara di Sulawesi Utara. Saat ini, Lanut Utara dalam kondisi perawatan & pemeliharaan.

3. Radiant Utama Interinsco Tbk (RUIS)

PT Radiant Utama Interinsco Tbk. (RUIS) merupakan Perusahaan nasional yang berpengalaman dalam industri Minyak dan Gas Indonesia selama lebih dari 30 tahun dalam menyediakan jasa penunjang teknis untuk sektor minyak dan gas dari hulu sampai hilir, serta industry terkait lainnya. RUIS didirikan sejak tahun 1984 dengan mengawali kiprahnya di bidang usaha jasa *Non- Destructive Testing* (NDT) dan Inspeksi. Seiring perkembangan tantangan dan peluang bisnis yang cukup ekspansif, RUIS mengukuhkan dan memperkuat bisnis usahanya dengan melakukan pembentukan *Strategic Business Unit* (SBU) dan memfungsikan diri sebagai *Holding Company* untuk menunjang keberhasilannya.

4. Adaro Energy Tbk (ADRO)

Adaro Energy adalah perusahaan energi yang terintegrasi secara vertikal di Indonesia. Adaro bertujuan untuk menciptakan nilai yang berkelanjutan dari batubara Indonesia serta menyediakan energi yang dapat diandalkan untuk pembangunan Indonesia. Adaro memiliki model bisnis terintegrasi yang dikenal dengan *pit-to-power* dengan tiga pilar utama pertumbuhan: pertambangan batubara, jasa pertambangan dan logistik, dan ketenagalistrikan. Lokasi utama tambang Adaro terletak di Kalimantan Selatan, tempat ditambangnya Envirocoal, batubara termal dengan kadar polutan yang rendah, dan Adaro memiliki anak-anak perusahaan di sepanjang rantai pasokan batubara, mulai dari pertambangan,

pengangkutan batubara, pemuatan batubara, pemeliharaan alur sungai, pelabuhan, pemasaran, sampai ketenagalistrikan.

5. Baramulti Suksessarana Tbk (BSSR)

PT Baramulti Suksessarana Tbk (Perseroan) memulai usahanya di bidang perdagangan batubara. Pada 2011, Perseroan mulai memproduksi batubara sendiri di Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara (IUP OP), yaitu di Loa Janan, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Berdasarkan Anggaran Dasar Pasal 3, kegiatan usaha Perseroan adalah melakukan berbagai kegiatan usaha yang berhubungan dengan pertambangan batubara, perdagangan batubara, pengangkutan dan perindustrian. Perseroan sebagai pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) Batubara mengutamakan kegiatan di bidang usaha pertambangan dengan hasil produk yang dihasilkan berupa batubara. Untuk kegiatan usaha lainnya adalah kegiatan usaha yang terkait dengan penjualan batubara dan kegiatan usaha yang menunjang pertambangan batubara itu sendiri.

6. Darma Henwa Tbk (DEWA)

Sesuai Anggaran Dasar PT Darma Henwa Tbk, bidang usaha Perseroan adalah sektor energi pertambangan, pekerjaan umum, pemborongan, penggalian, pengupasan, pemindahan tanah, pembuatan jalan atau jembatan, perataan lapangan, pembuatan, pengairan, pemborongan penambangan serta pengolahan, dan pemasarannya. Perseroan fokus pada bidang jasa kontraktor pertambangan umum serta pemeliharaan dan perawatan peralatan pertambangan. Sampai tahun

2016, Perseroan menjalankan bidang usaha jasa kontraktor pertambangan umum, mulai beroperasi komersial pada tahun 1996.

7. Indo Tambangraya Megah Tbk (ITMG)

ITM merupakan perusahaan produsen batubara Indonesia terkemuka untuk pasar energi dunia. Perusahaan berupaya untuk menetapkan standar tertinggi dalam bidang GCG, serta Kepatuhan terhadap Mutu, Lingkungan, serta Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Seluruh kegiatan ITM dilaksanakan dengan kolaborasi yang erat dengan masyarakat setempat dan pemangku kepentingan lainnya. Berdasarkan Akta No. 30 tertanggal 11 Mei 2009 dan Akta No. 24 tertanggal 14 Agustus 2009, dibuat di hadapan Notaris Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto, SH, sebagaimana telah disetujui oleh Surat Keputusan Menteri Hukum & HAM No. AHU-41810. AH.01.02. Tahun 2009 tertanggal 27 Agustus 2009, maksud dan tujuan Perusahaan adalah berusaha dalam bidang pertambangan, pembangunan, pengangkutan, perbengkelan, perdagangan, perindustrian dan jasa.

8. Resource Alam Indonesia Tbk (KKGI)

Didirikan dengan nama PT Kurnia Kapuas Utama Glue Industries pada tahun 1981, perseroan pada mulanya menjalankan kegiatan bisnis produksi *adhesive* kayu. Sepuluh tahun sejak didirikan, perseroan memutuskan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana. Aksi korporasi ini dilakukan Perseroan dalam rangka meningkatkan nilai perusahaan secara keseluruhan. Sejak saat itu, saham Perseroan tercatat di Bursa Efek Indonesia (d/h Bursa Efek Jakarta) dengan kode saham KKGI. Tahun 2003 merupakan langkah awal Perseroan dalam hal diversifikasi usaha dan mulai menekuni industri pertambangan batubara.

Diversifikasi usaha tersebut ditandai dengan adanya perubahan Pada nama menjadi PT Resource Alam Indonesia Tbk di tahun yang sama.

9. Samindo Resources Tbk (MYOH)

Perseroan merupakan *investment holding company* terkemuka di Indonesia yang menyediakan jasa pertambangan batubara terintegrasi dengan kompetensi inti di bidang jasa pemindahan batuan penutup, produksi batubara, pengangkutan batubara dan pemboran eksplorasi. Sebelum bersinergi menjadi PT Samindo Resources Tbk, seluruh anak usaha Perseroan telah lebih dulu malang melintang di industri batubara di tanah air. Lebih dari dua dekade anak usaha Perseroan dipercaya untuk mengelola tambang batubara milik PT KIDECO Jaya Agung yang berlokasi di Kalimantan Timur. Sebagai perusahaan *holding company*, Perseroan melakukan kegiatan operasionalnya melalui empat anak usahanya, yaitu PT. SIMS Jaya Kaltim, PT Samindo Utama Kaltim, PT Trasindo Murni Perkasa, PT Mintec Abadi.

10. Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk (TOBA)

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Tambang Batu Bara Bukit Asam Tbk atau biasa disingkat dengan PT Bukit Asam (Persero) Tbk. Berdiri pada tanggal 2 Maret 1991 dengan Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 1980 sebagai dasar hukum pendirian perusahaan. Kegiatan usaha PT Bukit Asam (Persero) Tbk terbagi menjadi beberapa segmen diantaranya yaitu Pertambangan Batu Bara, Investasi, Jasa Penambangan, PLTU, Pegusahaan Briket Batu Bara. Saham dari PT Bukit Asam (Persero) Tbk dimiliki oleh Pemerintah Indonesia sebanyak 65,02% sedangkan sisanya yang sebanyak 34,98% dimiliki publik.

11. Toba Bara Sejahtera Tbk (TOBA)

Perseroan merupakan salah satu produsen batu bara termal utama terbesar di Indonesia yang memiliki luas konsesi area sekitar 7.087 hektar dan total estimasi sumber daya batu bara sebesar 236 juta ton. Lokasi tambang Perseroan terdapat di Sangasanga, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Pemegang saham terbesar Perseroan adalah PT Toba Sejahtera, sebuah kelompok usaha yang bergerak di bidang energi dan perkebunan. Ketiga konsesi tambang yang berlokasi di Sangasanga, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur dioperasikan oleh 3 (tiga) anak perusahaan Perseroan yaitu PT Adimitra Baratama Nusantara (ABN), PT Indomining (IM), dan PT Trisensa Mineral Utama (TMU).

C. Analisis Data

1. Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel atau populasi sebagaimana adanya, tanpa membuat kesimpulan yang berlaku umum (Sugiyono dalam Sudarmanto, 2013: 150). Berikut ini merupakan hasil deskripsi variabel penelitian pengaruh *Good Corporate Governance* (komisaris independen dan komite audit) dan *Corporate Social Responsibility* terhadap *Tax Avoidance (Current ETR)* untuk perusahaan pertambangan selama periode penelitian yaitu tahun 2014-2016:

a) Komisaris Independen

Komisaris independen merupakan anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota direksi, dan/atau anggota dewan komisaris lainnya (Effendi, 2016:36). Berikut ini merupakan proporsi komisaris independen perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2016:

Tabel 7. Proporsi Komisaris Independen

No	Kode	Proporsi Komisaris Independen			Rata-rata
		2014	2015	2016	
1.	CTTH	0,3333	0,3333	0,5000	0,3889
2.	PSAB	0,3333	0,5000	0,5000	0,4444
3.	RUIS	0,3333	0,3333	0,3333	0,3333
4.	ADRO	0,4000	0,4000	0,4000	0,4000
5.	BSSR	0,2857	0,3750	0,3750	0,3452
6.	DEWA	0,4000	0,3333	0,3333	0,3555
7.	ITMG	0,3333	0,3333	0,4000	0,3555
8.	KKGI	0,4000	0,4000	0,4000	0,4000
9.	MYOH	0,3333	0,3333	0,3333	0,3333
10.	PTBA	0,3333	0,3333	0,3333	0,3333
11.	TOBA	0,6667	0,6667	0,6667	0,6667
Nilai tertinggi		0,6667	0,6667	0,6667	0,6667
Nilai terendah		0,2857	0,3333	0,3333	0,3333
Rata-rata		0,3775	0,3947	0,4159	0,3960

Sumber: Diolah peneliti, 2018

Berdasarkan tabel diatas, rata-rata proporsi komisaris independen adalah 0,3960. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan pertambangan rata-rata telah memiliki proporsi komisaris independen yang sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu butir 1-a dari Peraturan Pencatatan Efek Nomor I-A PT Bursa Efek Jakarta mengenai ketentuan umum pencatatan efek yang bersifat ekuitas di bursa mengatur tentang rasio komisaris independen (Effendi, 2016:37). Dalam butir tersebut dinyatakan bahwa jumlah komisaris independen

sekurang-kurangnya 30% dari jumlah seluruh anggota komisaris (Effendi, 2016:37).

Apabila dilihat dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah rata-rata proporsi komisaris independen meningkat setiap tahun mulai dari tahun 2014 sebesar 0,3775 kemudian pada tahun 2015 sebesar 0,3947 dan tahun 2016 sebesar 0,4159. Namun, terdapat satu perusahaan yang belum memenuhi ketentuan proporsi komisaris independen yaitu perusahaan dengan kode BSSR pada tahun 2014. Nilai tertinggi proporsi komisaris independen yaitu sebesar 0,6667 sedangkan nilai terendah untuk proporsi komisaris independen adalah sebesar 0,2857.

b) Komite Audit

Salah satu tugas komite audit adalah membantu komisaris/dewan pegawai untuk memastikan efektivitas sistem pengendalian internal dan pelaksanaan tugas auditor internal dan eksternal (Effendi, 2016:52). Berikut ini merupakan perhitungan komite audit perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2016:

Tabel 8. Komite Audit

No	Kode	In Komite Audit			Rata-rata
		2014	2015	2016	
1.	CTTH	1,0986	1,0986	1,0986	1,0986
2.	PSAB	1,0986	1,0986	1,0986	1,0986
3.	RUIS	1,0986	1,0986	1,0986	1,0986
4.	ADRO	1,0986	1,0986	1,0986	1,0986
5.	BSSR	0,6931	1,0986	1,0986	0,9634
6.	DEWA	1,0986	1,0986	1,0986	1,0986
7.	ITMG	1,0986	1,0986	1,0986	1,0986
8.	KKGI	1,0986	1,0986	1,0986	1,0986
9.	MYOH	1,0986	1,0986	1,0986	1,0986
10.	PTBA	1,3863	1,3863	1,0986	1,2904

11.	TOBA	1,0986	1,0986	1,0986	1,0986
	Nilai tertinggi	1,3863	1,3863	1,0986	1,2904
	Nilai terendah	0,6931	1,0986	1,0986	0,9634
	Rata-rata	1,0879	1,1248	1,0986	1,1037

Sumber: Diolah peneliti, 2018

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa rata-rata komite audit yaitu sebesar 1,1037. Diketahui bahwa rata-rata perusahaan pertambangan memiliki jumlah anggota komite audit sebanyak 3 orang ($\ln 3 = 1,0986$). Hal ini menunjukkan bahwa jumlah komite audit perusahaan pertambangan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Keanggotaan komite audit sekurang-kurangnya terdiri dari tiga orang anggota, seorang anggota diantaranya merupakan komisaris independen yang merangkap menjadi ketua komite audit, sedangkan anggota lainnya merupakan pihak ekstern yang independen dimana sekurang-kurangnya satu diantaranya memiliki kemampuan di bidang akuntansi dan atau keuangan (Effendi, 2016:55).

Perusahaan yang memiliki jumlah komite audit yang tidak sesuai dengan peraturan yaitu perusahaan dengan kode BSSR pada tahun 2014 yaitu sebanyak 2 orang ($\ln 2 = 0,6931$). Nilai tertinggi berdasarkan tabel diatas yaitu sebesar 1,3863 (sebanyak 4 orang). Sedangkan nilai terendah yaitu sebesar 0,6931 (2 orang).

c) *Corporate Social Responsibility*

Corporate Social Responsibility diukur berdasarkan indeks pengungkapan *Corporate Social Responsibility* berdasarkan GRI 4.0. Berikut ini merupakan indeks pengungkapan *Corporate Social Responsibility*

perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2016:

Tabel 9. Corporate Social Responsibility Disclosure Index

No	Kode	Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i>			Rata-rata
		2014	2015	2016	
1.	CTTH	0,154	0,132	0,165	0,150
2.	PSAB	0,132	0,143	0,165	0,147
3.	RUIS	0,143	0,176	0,187	0,169
4.	ADRO	0,242	0,231	0,253	0,242
5.	BSSR	0,132	0,264	0,286	0,227
6.	DEWA	0,330	0,341	0,374	0,348
7.	ITMG	0,242	0,308	0,275	0,275
8.	KKGI	0,220	0,242	0,330	0,264
9.	MYOH	0,319	0,341	0,341	0,334
10.	PTBA	0,418	0,418	0,418	0,418
11.	TOBA	0,220	0,220	0,231	0,224
Nilai tertinggi		0,418	0,418	0,418	0,418
Nilai terendah		0,132	0,132	0,165	0,147
Rata-rata		0,232	0,256	0,275	0,254

Sumber: Diolah peneliti, 2018

Berdasarkan tabel diatas, rata-rata indeks pengungkapan *Corporate Social Responsibility* yaitu sebesar 0,254. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah pengungkapan *Corporate Social Responsibility* perusahaan pertambangan masih sedikit. Nilai terendah indeks pengungkapan *Corporate Social Responsibility* yaitu sebesar 0,132. Sedangkan nilai tertinggi indeks pengungkapan *Corporate Social Responsibility* yaitu sebesar 0,418. Namun, terdapat peningkatan rata-rata pengungkapan *Corporate Social Responsibility* untuk setiap tahun yaitu tahun 2014 sebesar 0,232 sedangkan tahun 2015 sebesar 0,256 dan tahun 2016 sebesar 0,275.

d) Tax Avoidance (Current ETR)

Tax Avoidance pada penelitian ini diukur berdasarkan *Current ETR*.

Berikut ini merupakan *Current ETR* perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2016:

Tabel 10. Current ETR

No	Kode	Current ETR			Rata-rata
		2014	2015	2016	
1.	CTTH	0,4378	0,5863	0,2542	0,4261
2.	PSAB	0,3409	0,4342	0,3777	0,3843
3.	RUIS	0,3118	0,3962	0,5399	0,4160
4.	ADRO	0,5260	0,5263	0,4605	0,5043
5.	BSSR	0,5414	0,2632	0,2329	0,3458
6.	DEWA	0,0000	0,0568	0,1124	0,0564
7.	ITMG	0,2734	0,5771	0,3270	0,3925
8.	KKGI	0,3519	0,3961	0,3462	0,3647
9.	MYOH	0,2601	0,2614	0,2678	0,2631
10.	PTBA	0,2125	0,2437	0,2417	0,2326
11.	TOBA	0,3868	0,3654	0,4436	0,3986
Nilai tertinggi		0,5414	0,5863	0,5399	0,5043
Nilai terendah		0,0000	0,0568	0,1124	0,0564
Rata-rata		0,3311	0,3733	0,3276	0,3440

Sumber: Diolah peneliti, 2018

Berdasarkan tabel diatas, rata-rata *Current ETR* perusahaan pertambangan yaitu sebesar 0,3440. Nilai tertinggi *Current ETR* yaitu sebesar 0,5863 sedangkan nilai terendah *Current ETR* yaitu sebesar 0,0000. Rata-rata *Current ETR* meningkat dari tahun 2014 ke 2015 dari 0,3311 ke 0,3733. Namun menurun kembali pada tahun 2016 yaitu sebesar 0,3276.

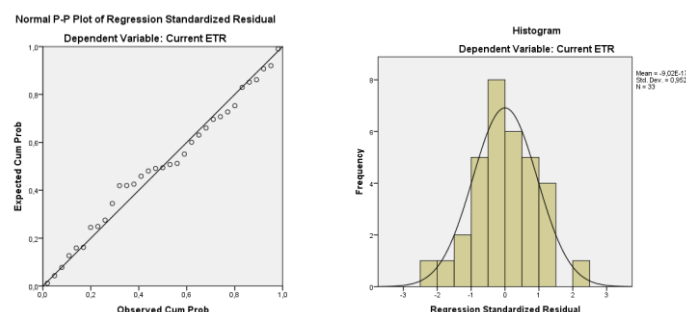
2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2016:154). Metode yang digunakan untuk menguji normalitas residual regresi menggunakan grafik histogram dan *Normal Probability Plots*, serta uji Kolmogorov-Smirnov. Berikut ini merupakan hasil dari uji normalitas dari model regresi linier berganda antara Komisaris Independen, Komite Audit, *Corporate Social Responsibility* terhadap *Current ETR (Tax Avoidance)*:

1) Uji Normalitas dengan Menggunakan grafik histogram dan *Normal Probability Plots*

Salah satu cara termudah untuk melihat normalitas residual adalah dengan melihat grafik histogram yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal (Ghozali, 2016:154), hasil dari uji normalitas menggunakan *Normal Probability Plots* adalah sebagai berikut:



Gambar 3. Uji Normalitas

Sumber: Diolah peneliti, 2018

Dari gambar diatas, dapat diketahui bahwa data menyebar serta mengikuti garis diagonal serta data pada grafik histogram mengikuti garis normal. Hal ini menunjukkan bahwa data penelitian terdistribusi normal. Jadi, dapat disimpulkan bahwa persamaan regresi pada model memenuhi asumsi normalitas.

2) Uji Normalitas dengan Menggunakan Uji Kolmogorov-Smirnov.

Uji normalitas dengan menggunakan grafik saja dapat menyesatkan jika tidak hati-hati, secara visual kelihatan normal namun secara statistik dapat sebaliknya. Maka, dianjurkan disamping uji normalitas menggunakan grafik dilengkapi dengan uji statistik (Ghozali, 2016:156). Berikut ini disajikan hasil uji normalitas terhadap model regresi linier berganda antara Komisaris Independen, Komite Audit dan *Corporate Social Responsibility* terhadap *Tax Avoidance (Current ETR)* dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov:

Tabel 11. Hasil Uji Normalitas

Kolmogorov-Smirnov Z	Nilai sig.	Keterangan
0,645	0,799	Berdistribusi Normal

Sumber: Diolah peneliti, 2018

Hasil uji normalitas di atas menunjukkan bahwa nilai signifikansi residual regresi sebesar 0,799. Dengan demikian, nilai nilai signifikansi residual regresi lebih besar dari 0,05 yang artinya apabila nilai Signifikansi $> 0,05$ maka data residual terdistribusi normal. Sehingga residual mengikuti distribusi normal dan asumsi normalitas terpenuhi.

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen (Ghozali, 2016:103). Model uji regresi yang baik selanjutnya tidak terjadi multikolinearitas. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas dengan cara menganalisis matriks korelasi variabel - variabel independen yang dapat di lihat melalui *Variance Inflation Factor* (VIF). Nilai VIF yang bisa ditoleransi adalah 10. Apabila nilai $VIF < 10$ maka disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas antar variabel bebas. Berikut ini merupakan hasil dari uji multikolinearitas:

Tabel 12. Hasil Uji Multikolinearitas

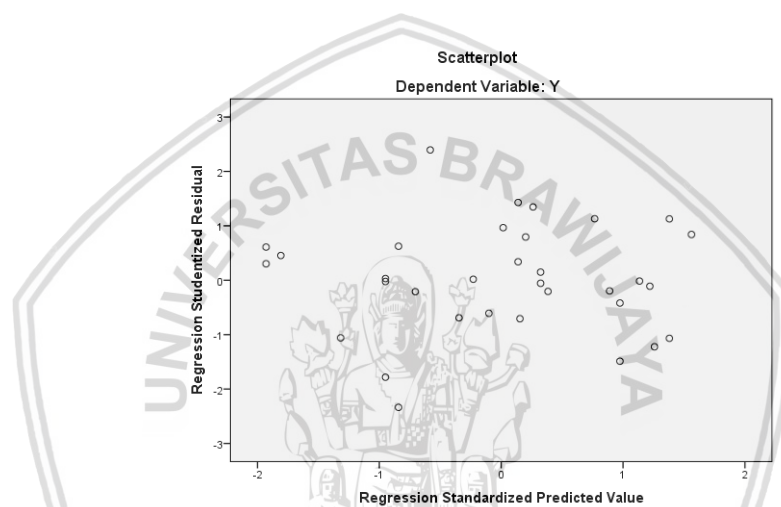
Variabel Bebas	Tolerance	VIF	Keterangan
INDP (X_1)	0,921	1,086	Tidak terjadi Multikolinearitas
KOMITE (X_2)	0,726	1,377	Tidak terjadi Multikolinearitas
CSRDI (X_3)	0,689	1,452	Tidak terjadi Multikolinearitas

Sumber: Data diolah, 2018

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa Komisaris Independen, Komite Audit dan *Corporate Social Responsibility* memiliki nilai *tolerance* lebih dari 0,1 dan nilai VIF kurang dari 10, maka tidak ditemukan adanya indikasi adanya multikolinearitas dalam model regresi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas antar variabel independen dalam model regresi, sehingga data yang dianalisis memenuhi asumsi multikolinearitas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain (Ghozali, 2017:134). Berikut ini merupakan hasil uji heteroskedastisitas melalui grafik plot antara prediksi variabel dependen yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID:



Gambar 4. Uji Heteroskedastisitas

Sumber: Diolah peneliti, 2018

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas menggunakan *scatterplots*, dasar analisisnya yaitu (Ghozali, 2016:134):

- 1) Jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang membentuk pola tertentu yang teratur, maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
- 2) Jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Berdasarkan grafik *scatterplot* tersebut terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi.

Selain menggunakan metode grafik, pengujian asumsi heteroskedastisitas dapat dilakukan juga dengan metode pengujian statistik uji Glejser. Uji Glejser dilakukan dengan meregresikan variabel bebas terhadap nilai absolut residualnya. Apabila nilai sig. > 0,05 maka akan terjadi homoskedastisitas dan jika nilai sig. < 0,05 maka akan terjadi heteroskedastisitas. Hasil uji Glejser dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 13. Hasil Uji Glejser

Variabel Bebas	Sig.	Keterangan
INDP (X_1)	0,385	Tidak terjadi Heteroskedastisitas
KOMITE (X_2)	0,756	Tidak terjadi Heteroskedastisitas
CSRDI (X_3)	0,912	Tidak terjadi Heteroskedastisitas

Sumber: Diolah peneliti, 2018

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa pada masing-masing variabel diperoleh nilai sig. > 0,05 maka disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas. Atau dengan kata lain asumsi non-heteroskedastisitas telah terpenuhi.

d. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya (Ghozali,

2017:107). Berikut ini merupakan hasil dari uji autokorelasi dengan uji Durbin Watson terhadap model regresi linier antara Komisaris Independen, Komite Audit dan *Corporate Social Responsibility* (CSRDI) terhadap *Tax Avoidance* (*Current ETR*):

Tabel 14. Hasil Uji Autokorelasi

dl	4-dl	du	4-du	dw	Interprestasi
1,258	2,742	1,651	2,349	1,679	Tidak terjadi autokorelasi

Sumber: Diolah peneliti, 2018

Berdasarkan hasil uji autokorelasi tersebut diketahui bahwa $du < dw < 4-du$ atau nilai $1,651 < 1,679 < 2,349$ sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa model regresi terbebas dari masalah autokorelasi.

3. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menguji besarnya pengaruh variabel independen yaitu Komisaris Independen, Komite Audit, dan *Corporate Social Responsibility* terhadap variabel dependen yaitu *Tax Avoidance*. Berikut ini merupakan hasil regresi linier berganda:

Tabel 15. Hasil Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	0,629	0,250		2,516	0,018
¹ INDP (X ₁)	-0,019	0,220	-0,014	-0,087	0,931
KOMITE (X ₂)	-0,035	0,247	-0,025	-0,143	0,887
CSRDI (X ₃)	-0,938	0,292	-0,580	-3,210	0,003

Sumber: Diolah peneliti, 2018

Berdasarkan tabel diatas, maka hasil persamaan regresi linier berganda antara variabel Komisaris Independen, Komite Audit, dan *Corporate Social Responsibility* terhadap *Tax Avoidance* dapat disajikan sebagai berikut:

$$\text{Current ETR} = - 0,014 \text{ INDP} - 0,025 \text{ KOMITE} - 0,580 \text{ CSRDI} + e$$

Dari persamaan diatas, dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. $\beta_1 = -0,014$

Nilai koefisien Komisaris Independen sebesar -0,014 menunjukkan setiap peningkatan variabel INDP (X_1) sebesar 1 satuan maka akan menurunkan *Current ETR* (Y) sebesar 0,014 dengan asumsi variabel lain konstan.

b. $\beta_2 = -0,025$

Nilai koefisien Komite Audit sebesar -0,025 menunjukkan setiap peningkatan variabel KOMITE (X_2) sebesar 1 satuan maka akan menurunkan *Current ETR* (Y) sebesar 0,025 dengan asumsi variabel lain konstan..

c. $\beta_3 = -0,580$

Nilai koefisien CSRDI sebesar -0,580 menunjukkan setiap peningkatan variabel CSRDI (X_3) sebesar 1 satuan maka akan menurunkan *Current ETR* (Y) sebesar 0,580 dengan asumsi variabel lain konstan.

4. Uji Hipotesis

a. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi menunjukkan kemampuan variabel Komisaris Independen, Komite Audit dan *Corporate Social Responsibility*

mempengaruhi variabel *Tax Avoidance* sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain diluar model. Besarnya koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 16. Hasil Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	,590 ^a	,348	,281

Sumber: Diolah peneliti, 2018

Nilai koefisien determinasi yang digunakan yaitu nilai *Adjusted R*². Banyak peneliti yang menganjurkan untuk menggunakan nilai *Adjusted R*², hal ini dikarenakan tidak seperti *R*², nilai *Adjusted R*² dapat naik atau turun apabila satu variabel ditambahkan ke dalam model (Ghozali, 2016:95). Penelitian ini menggunakan nilai Adjusted R Square untuk mengevaluasi model regresi terbaik. Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa nilai *Adjusted R*² adalah 0,281 atau 28,1% yang artinya besarnya pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit dan *Corporate Social Responsibility* terhadap *Tax Avoidance* yaitu sebesar 0,281 atau 28,1% sedangkan pengaruh terhadap variabel *Tax Avoidance* yang dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini adalah sebesar 71,9%.

b. Uji F

Untuk menguji pengaruh dari variabel Komisaris Independen, Komite Audit dan *Corporate Social Responsibility* secara simultan terhadap variabel *Tax Avoidance* dapat diketahui melalui uji F. Dalam hipotesis ini, diduga bahwa variabel Komisaris Independen (X_1), Komite Audit (X_2)

dan *Corporate Social Responsibility* (X_3) secara bersama-sama mempengaruhi *Tax Avoidance* (Y). Variabel independen pembentuk model regresi dikatakan berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap variabel dependen jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau signifikan $< \alpha = 0,05$. Berikut ini merupakan hasil dari uji F:

Tabel 17. Hasil Uji F

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	0,227	3	0,076	5,165	0,006 ^b
Residual	0,425	29	0,015		
Total	0,651	32			

Sumber: Diolah peneliti, 2018

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa nilai F_{hitung} yaitu sebesar 5,165 sedangkan nilai F_{tabel} pada taraf nyata 5% dengan derajat independen 3 dan 29 adalah sebesar 2,934. Nilai signifikansi sebesar 0,006 kurang dari nilai 0,05. Sehingga dapat dikatakan bahwa $F_{hitung} > F_{tabel}$ dan nilai signifikansi $< 0,05$ sehingga H_1 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa Komisaris Independen, Komite Audit dan *Corporate Social Responsibility* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*.

c. Uji t

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel Komisaris Independen, Komite Audit dan *Corporate Social Responsibility* secara parsial terhadap variabel *Tax Avoidance*. Berikut ini merupakan hasil pengujian pengaruh antara Komisaris Independen, Komite Audit dan *Corporate Social Responsibility* terhadap *Tax Avoidance*:

Tabel 18. Hasil Uji t

Variabel independen	t_{hitung}	Sig. t	t_{tabel}	Keterangan
INDP (X_1)	-0,087	0,931	2,045	Tidak Signifikan
KOMITE (X_2)	-0,143	0,887	2,045	Tidak Signifikan
CSRDI (X_3)	-3,210	0,003	2,045	Signifikan

Sumber: Diolah peneliti, 2018

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa:

- 1) Uji parsial antara variabel Komisaris Independen terhadap variabel *Tax Avoidance* didapatkan nilai t_{hitung} sebesar -0,087, sedangkan t_{tabel} sebesar -2,045. Nilai signifikansi berdasarkan uji parsial adalah sebesar 0,931 sedangkan nilai alpha sebesar 0,050. Hal ini menunjukkan bahwa $-t_{hitung} > -t_{tabel}$ dan nilai signifikansi $> 0,05$. Sehingga H_2 ditolak dan dapat disimpulkan bahwa Komisaris Independen secara parsial tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap variabel *Current ETR (Tax Avoidance)*.
- 2) Uji parsial antara variabel Komite Audit terhadap variabel *Tax Avoidance* didapatkan nilai t_{hitung} -0,143 sedangkan nilai t_{tabel} -2,045. Nilai signifikansi sebesar 0,887 sedangkan nilai alpha sebesar 0,050. Hal ini menunjukkan bahwa $-t_{hitung} > -t_{tabel}$ dan nilai signifikansi $> 0,05$. Sehingga H_3 ditolak dapat disimpulkan bahwa Komite Audit secara parsial tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*.
- 3) Uji parsial antara variabel *Corporate Social Responsibility* terhadap variabel *Tax Avoidance* didapatkan nilai t_{hitung} sebesar -3,210 sedangkan nilai t_{tabel} adalah sebesar -2,045. Nilai signifikansi sebesar

0,003 sedangkan nilai alpha sebesar 0,050. Hal ini menunjukkan bahwa $-t_{hitung} < -t_{tabel}$ dan nilai signifikansi $< 0,05$. Sehingga H_4 diterima dapat disimpulkan bahwa *Corporate Social Responsibility* secara parsial memberikan pengaruh signifikan terhadap variabel *Tax Avoidance*.

D. Pembahasan

1. Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit dan *Corporate Social Responsibility* secara simultan terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan hasil dari uji F diketahui bahwa nilai F_{hitung} yaitu sebesar 5,165 sedangkan nilai F_{tabel} yaitu sebesar 2,934. Nilai signifikansi sebesar 0,006 kurang dari nilai 0,05. Sehingga dapat dikatakan bahwa $F_{hitung} > F_{tabel}$ dan nilai signifikansi $< 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara Komisaris Independen, Komite Audit dan *Corporate Social Responsibility* terhadap *Tax Avoidance* secara simultan, oleh karena itu H_1 diterima.

Apabila perusahaan menjalankan *Good Corporate Governance* dengan baik, maka perusahaan tersebut akan mengimplementasikan *Corporate Social Responsibility*, sehingga perusahaan dapat menghindari/menekan tindakan *Tax Avoidance*. Oleh karena itu *Good Corporate Governance* dan *Corporate Social Responsibility* secara simultan berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian dari Hidayati dan Fidiana (2017) yang menyatakan bahwa *Corporate Social Responsibility* dan *Good Corporate*

Governance (Komisaris Independen, Komite Audit dan Kualitas Audit) berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak secara simultan.

2. Pengaruh Parsial serta Variabel Dominan

a) Pengaruh Komisaris Independen terhadap *Tax Avoidance*

Komisaris Independen terhadap variabel *Tax Avoidance* didapatkan nilai t_{hitung} sebesar -0,087, sedangkan t_{tabel} sebesar -2,045. Nilai signifikansi berdasarkan uji parsial adalah sebesar 0,931 sedangkan nilai alpha sebesar 0,050. Hal ini menunjukkan bahwa $-t_{hitung} > -t_{tabel}$ dan nilai signifikansi $> 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan antara variabel Komisaris Independen terhadap variabel *Tax Avoidance* oleh karena itu H_2 ditolak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa banyak sedikitnya jumlah Komisaris Independen tidak menjamin perusahaan tidak melakukan *Tax Avoidance*. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja komisaris independen dalam menekan terjadinya *Tax Avoidance* masih kurang efektif.

Keberadaan komisaris independen memegang peranan penting dalam rangka implementasi *Good Corporate Governance*, bukan pelengkap untuk memenuhi peraturan yang berlaku. Namun, apabila dilihat dari hasil penelitian ini, keberadaan komisaris independen hanya digunakan untuk memenuhi peraturan yang berlaku. Kenaikan persentase dari komisaris independen dibandingkan dengan total anggota dewan komisaris tidak memberikan pengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

Pihak Bursa Efek Indonesia hendaknya melakukan evaluasi dan pengawasan secara periodik untuk meyakinkan bahwa pelaksanaan komisaris independen di perusahaan publik telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Effendi, 2016:45). Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Hidayati dan Fidiana (2017) yang menyatakan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

b) Pengaruh Komite Audit terhadap *Tax Avoidance*

Uji parsial antara variabel Komite Audit terhadap variabel *Tax Avoidance* didapatkan nilai t_{hitung} -0,143 sedangkan nilai t_{tabel} -2,045. Nilai signifikansi sebesar 0,887 sedangkan nilai alpha sebesar 0,050. Hal ini menunjukkan bahwa $-t_{hitung} > -t_{tabel}$ dan nilai signifikansi $> 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan antara variabel Komite Audit terhadap variabel *Tax Avoidance*, oleh karena itu H_3 ditolak.

Hal ini menunjukkan bahwa jumlah komite audit tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Apabila dilihat dari hasil penelitian, masih terdapat perusahaan yang memiliki jumlah sebanyak 2 orang sedangkan jumlah minimum dari komite audit menurut Surat Edaran dari Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. SE-008/BEJ/12-2001 mengenai keanggotaan komite audit yaitu sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang termasuk ketua komite audit. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat perusahaan yang memiliki jumlah komite audit yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja komite audit kurang efektif dalam melakukan pengawasan terhadap kebijakan yang berhubungan dengan

aktivitas penghindaran pajak. Komite audit hendaknya dapat berperan secara efektif untuk melakukan deteksi dini adanya penyimpangan atau kecurangan di perusahaan publik (Effendi, 2016:38). Hasil penelitian ini, sesuai dengan hasil penelitian Wijayanti *et al.* (2016), Eksandy (2017), serta Hidayati dan Fidiana (2017) yang menyatakan bahwa komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

c) Pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan hasil uji parsial variabel *Corporate Social Responsibility* terhadap variabel *Tax Avoidance* didapatkan nilai t_{hitung} sebesar -3,210 sedangkan nilai t_{tabel} adalah sebesar -2,045. Nilai signifikansi sebesar 0,003 sedangkan nilai alpha sebesar 0,050. Hal ini menunjukkan bahwa $-t_{hitung} < -t_{tabel}$ dan nilai signifikansi $< 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh negatif signifikan antara variabel *Corporate Social Responsibility* terhadap variabel *Tax Avoidance*, oleh karena itu H_4 diterima.

Penerapan *Corporate Social Responsibility* bertujuan agar dapat mempertahankan keberlanjutan usaha suatu perusahaan. Dengan menerapkan *Corporate Social Responsibility* artinya perusahaan tersebut menjalankan kegiatan operasionalnya dengan memperhatikan etika bisnis. Perusahaan harus mampu mempertimbangkan faktor lingkungan dan sosial disekitarnya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara pengungkapan *Corporate Social Responsibility* dengan penghindaran pajak. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa *Corporate Social Responsibility* memiliki pengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*. Hal ini

berarti semakin tinggi tingkat pengungkapan *Corporate Social Responsibility* maka semakin rendah *Tax Avoidance*, sebaliknya semakin rendah tingkat pengungkapan *Corporate Social Responsibility* maka semakin tinggi *Tax Avoidance*.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Lanis dan Richardson (2012) yang menguji hubungan *Corporate Social Responsibility* dan agresivitas pajak mengungkapkan bahwa dengan pengungkapan *Corporate Social Responsibility* dapat mengurangi tindakan agresivitas pajak. Dari hasil penelitian tersebut, dapat dikatakan bahwa pengungkapan *Corporate Social Responsibility* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

d) Variabel Dominan

Penentuan variabel independen (Komisaris Independen, Komite Audit, dan *Corporate Social Responsibility*) yang paling berpengaruh terhadap variabel dependen (*Tax Avoidance*) dapat dilakukan dengan membandingkan koefisien regresi (koefisien beta) antara variabel yang satu dengan yang lain. Variabel independen yang paling dominan pengaruhnya terhadap variabel dependen adalah variabel yang memiliki koefisien regresi (koefisien beta) yang paling besar. Berikut adalah tabel peringkat yang membandingkan koefisien regresi masing-masing variabel independen:

Tabel 19. Peringkat Koefisien Beta

Peringkat	Variabel	Koefisien Beta
1	CSRDI (X_3)	-0,580
2	KOMITE (X_2)	-0,025
3	INDP (X_1)	-0,014

Sumber: Diolah peneliti, 2018

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa variabel *Corporate Social Responsibility* (CSRDI) merupakan variabel yang memiliki koefisien beta yang paling besar. Artinya, variabel dependen (*Tax Avoidance*) lebih banyak dipengaruhi oleh variabel *Corporate Social Responsibility* (CSRDI) daripada variabel lainnya. Koefisien beta pada variabel ini bertanda negatif, artinya semakin tinggi *Corporate Social Responsibility* maka *Tax Avoidance* akan semakin menurun, sebaliknya semakin rendah *Corporate Social Responsibility* maka *Tax Avoidance* akan semakin meningkat.

Variabel yang memiliki koefisien beta paling tinggi yaitu variabel *Corporate Social Responsibility* yaitu dengan nilai beta sebesar 0,580. Hal ini menunjukkan bahwa H₂ ditolak. Komisaris Independen tidak berpengaruh secara dominan terhadap *Tax Avoidance*. *Corporate Social Responsibility* berpengaruh secara dominan terhadap *Tax Avoidance*, hasil penelitian ini tidak sesuai dengan hasil penelitian Rahmawati *et al.* (2016) yang menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh secara dominan terhadap *tax avoidance*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *Good Corporate Governance* (yang diproksikan oleh komisaris independen dan komite audit) serta *Corporate Social Responsibility* yang diproksikan oleh *Corporate Social Responsibility Disclosure Index* terhadap *Tax Avoidance* yang diproksi oleh *Current ETR* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014-2016. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa:

1. Berdasarkan hasil uji simultan, nilai $F_{hitung} (5,165) > F_{tabel} (2,934)$ dan nilai signifikansi $(0,006) < 0,05$, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa Komisaris Independen, Komite Audit dan *Corporate Social Responsibility* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*,
2. Berdasarkan hasil uji parsial variabel Komisaris Independen terhadap variabel *Tax Avoidance*, nilai $-t_{hitung}$ sebesar $(-0,087) > -t_{tabel} (-2,045)$ dan nilai signifikansi $(0,931) > 0,05$. Hal ini H_2 ditolak dan dapat disimpulkan bahwa Komisaris Independen secara parsial tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap variabel *Current ETR (Tax Avoidance)*.
3. Berdasarkan hasil uji parsial antara variabel Komite Audit terhadap variabel *Tax Avoidance*, nilai $-t_{hitung} (-0,143) > -t_{tabel} (-2,045)$ dan nilai signifikansi $(0,887) > 0,050$. Hal ini menunjukkan bahwa H_3 ditolak dapat disimpulkan

bahwa Komite Audit secara parsial tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*.

4. Berdasarkan hasil uji parsial antara variabel *Corporate Social Responsibility* terhadap variabel *Tax Avoidance*, nilai $-t_{hitung} (-3,210) < -t_{tabel} (-2,045)$ dan nilai signifikansi sebesar $(0,003) < 0,050$. Hal ini menunjukkan H_4 diterima dapat disimpulkan bahwa *Corporate Social Responsibility* secara parsial memberikan pengaruh negatif signifikan terhadap variabel *Tax Avoidance*.
5. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, diperoleh nilai Adjusted R^2 sebesar 0,281 atau 28,1%, hal ini menunjukkan bahwa variabel *Tax Avoidance* dipengaruhi sebesar 28,1% oleh variabel Komisaris Independen (X_1), Komite Audit (X_2) dan *Corporate Social Responsibility* (X_3). Sedangkan sisanya sebesar 71,9% dipengaruhi oleh variabel lain di luar persamaan regresi atau yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

B. Keterbatasan Masalah

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang mungkin dapat mempengaruhi hasil penelitian, diantaranya yaitu:

1. Penelitian ini memiliki sampel yang kecil yaitu 11 perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dalam periode pengamatan 3 tahun yaitu mulai 2014 sampai dengan 2016.
2. Penelitian ini juga memiliki nilai R^2 yang relatif kecil yaitu hanya sebesar 28,1% yang artinya variabel dalam penelitian ini hanya berpengaruh sebesar

28,1% terhadap *tax avoidance* sedangkan 71,9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini.

C. Saran

Berdasarkan hasil penelitian serta kesimpulan yang telah dijelaskan diatas, terdapat beberapa saran yang dapat dipertimbangkan dalam penelitian selanjutnya, diantaranya yaitu:

1. Diharapkan penelitian selanjutnya dapat memperluas populasi dan sampel penelitian serta menambah rentang periode tahun penelitian agar hasil penelitian dapat lebih baik lagi serta diharapkan penelitian dapat dilakukan pada sektor usaha lainnya.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan variabel independen lain di luar variabel yang digunakan dalam penelitian ini agar memperoleh hasil yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Creswell, John W. 2014. *Research Design (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan Mixed)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Effendi, Muh. Arief. 2016. *The Power of Good Corporate Governance: Teori dan Implementasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gitosudarmo, Indriyo. 2012. *Manajemen Strategis*. Yogyakarta: BPFE.
- Hadi, Nor. 2014. *Corporate Social Responsibility*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Hamali, Arif Yusuf. 2016. *Pemahaman Strategi Bisnis & Kewirausahaan*. Bandung: Prenadamedia.
- Hamdani. 2016. *Good Corporate Governance: Tinjauan Etika dalam Praktik Bisnis*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Hasan, M. Iqbal. 2012. *Pokok-Pokok Materi Statistik 2: Statistik Inferensif*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kuncoro, Mudrajat. 2009. *Metode Riset untuk Bisnis & Ekonomi Edisi 3*. Jakarta: Erlangga.
- Lako, A. 2010. *Dekonstruksi CSR & Reformasi Paradigma Bisnis dan Akuntansi*. Semarang: Penerbit Erlangga.
- Lupiyoadi, Rambat dan Ridho Bramulya Ikhsan. 2015. *Good Corporate Governance: Teori dan Implementasi*. Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat.
- Neoleka, Amos. 2014. *Metode Penelitian dan Statistik*. Jakarta: Rosda.
- Pandiangan, Liberti. 2014. *Administrasi Perpajakan Pedoman Praktis Bagi Wajib Pajak di Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Pohan, Chairil Anwar. 2011. *Optimizing Corporate Tax Management Kajian Perpajakan dan Tax Planning-nya Terkini*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Prasetya, Rudhi. 2014. *Perseroan Terbatas Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Priyatno, Duwi. 2016. *Belajar Alat Analisis Data dan Cara Pengolahannya dengan SPSS*. Yogyakarta: Gava Media.
- Riadi, Edi. 2016. *Statistika Penelitian: Analisis Manual dan IBM SPSS*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Rusdianto, Ujang. 2013. *CSR Communication A Framework for PR Practitioners*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sarwono, Jonathan. 2013. *Strategi Melakukan Riset*. Jakarta: Penerbit Andi.
- Siagian, Sondang P. 2012. *Teori Pengembangan Organisasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Suandy, Erly. 2017. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Suandy, Erly. 2014. *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sudarmanto, R. Gunawan. 2013. *Statistik Terapan Berbasis Komputer dengan Program IBM SPSS Statistic 19*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharyadi dan Purwanto. 2015. *Statistika untuk Ekonomi dan Keuangan Modern*. Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat.
- Sutedi, Adrian. 2012. *Good Corporate Governance*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Untung, Hendrik Budi. 2009. *Corporate Social Responsibility*. Yogyakarta: Sinar Grafika.
- Wahyudi, Isa dan Busyra Azheri. 2011. *Corporate Social Responsibility: Prinsip, Pengaturan & Implementasi*. Malang: Setara Press dan Inspire.
- Wibisono, Yusuf. 2007. *Membedah Konsep & Aplikasi Corporate Social Responsibility*. Gresik: Fascho Publishing.
- Zulganef. 2013. *Metode Penelitian Sosial & Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

JURNAL:

- Eksandy, Arry. 2017. Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit, dan Kualitas Audit terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*). *Competitive*, 1(1): 1-20.

- Hidayati, Nurul dan Fidiana. 2017. Pengaruh *Corporate Social Responsibility* dan *Good Corporate Governance* terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 6(3): 1052-1070.
- Hanlon, M. dan S. Heitzman. 2010. A Review of Tax Research. *Journal of Accounting and Economics*, 50: 127-178.
- Lanis, R., dan G. Richardson. 2012. Corporate Social Responsibility and Tax Aggresiveness: an Empirical Analysis. *Journal of Accounting and Public Policy*, 31: 86-108.
- Rahmawati, A., M.G. W. Endang, dan R. R. Agusti. 2016. Pengaruh *Corporate Social Responsibility* dan *Corporate Governance* Terhadap *Tax Avoidance*. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 10(1): 1-9.
- Syafitri, Tria, Nila Firdausi Nuzula, dan Ferina Nurlaily. 2018. Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, 56(1): 118-126.
- Wahyudi, Dudi. 2015. Analisis Empiris Pengaruh Aktivitas *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap Penghindaran Pajak di Indonesia. *Jurnal Lingkar Widyaiswara*, 2(4): 5-17.
- Wijayanti, A., A. Wijayanti, dan Y. C. Samrotun. 2016. Pengaruh Karakteristik Perusahaan GCG dan CSR Terhadap Penghindaran Pajak. *Seminar Nasional IENACO. Universitas Islam Batik Surakarta*: 541-548

PUBLIKASI ONLINE:

- Oktovian, Muhammad. 2015. Pengaruh *Corporate Governance* terhadap *Tax Avoidance* (Studi Empiris pada Sektor Perbankan yang Terdaftar di BEI Periode Tahun 2009-2013). *Skripsi*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Utami, Suci Sedy. 2017. Kontrak Karya Tambang Jadi Celah untuk Menghindari Pajak. Diakses pada 24 Desember 2017 melalui <http://metrotvnews.com/ekonomi/energi/kontrak-karya-tambang-jadi-celah-untuk-menghindari-pajak>